

PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT

(Studi Pada Desa Wisata Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Disusun Oleh :

IDHA ZAITUN NISA ARYANI ZULHA

NIM. 125030107111127



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Maret 2017
Jam : 11.00 – 12.00 WIB
Skripsi Atas nama : Idha Zaitun Nisa Aryani Zulha
Judul : Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat
(Studi Pada Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Dan dinyatakan LULUS

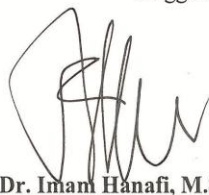
MAJELIS PENGUJI

Ketua



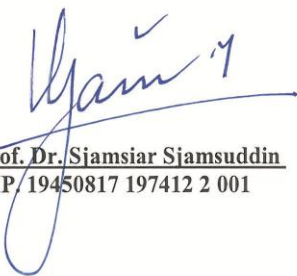
Dr. Riyanto, Drs., M.Hum
NIP. 19600430 198601 1 001

Anggota



Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota



Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota



Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat

(Studi Pada Desa Wisata Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Disusun Oleh : Idha Zaitu Nisa Aryani Zulha

NIM : 125030107111127

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 8 Agustus 2016

Komisi Pembimbing

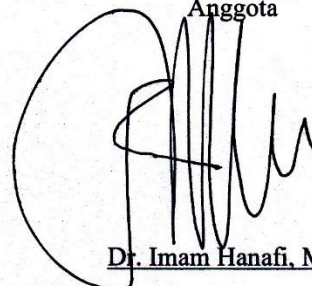
Ketua



Dr. Riyanto, Drs., M.Hum

NIP. 19600430 198601 1001

Anggota



Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS

NIP. 19691002 1998 02 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul “**Perkembangan Ekowisata Brbasis Masyarakat** (Studi Pada Desa Wisata Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu)” tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 8 Agustus 2016



Idha Zaitun Nisa Aryani Zulha
12503010711127

RINGKASAN

Idha Zaitun Nisa Aryani Zulha, 2016, **Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat (*Community-based Ecotourism*) di Kota Batu**, Dr. Riyanto, Drs., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I, dan Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS sebagai Dosen Pembimbing II.

Berdasar pada potensi alamiah yang memiliki daya tarik wisata, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Batu mulai memperkenalkan istilah desa wisata sebagai suatu alternatif wisata yang berpijak pada konsep ekowisata berbasis masyarakat dimana penyelenggaraan kegiatan wisata dilakukan dengan memanfaatkan kondisi lingkungan secara alamiah dikelola oleh masyarakat lokal. Sebagai suatu objek wisata yang cukup diperhatikan eksistensinya, desa wisata belum memiliki daya saing yang tinggi apabila dibandingkan objek-objek wisata lain yang ada di Kota Batu. Hal tersebut dikarenakan dari segi sumber daya manusia yang masih rendah, minimnya sarana-prasarana, serta berbagai regulasi tentang desa wisata yang belum ada di tingkat desa/kelurahan, sehingga dilakukan suatu pengembangan baik dari pemerintah maupun masyarakat agar desa wisata dapat menjadi objek wisata yang lebih baik. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengembangan ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*) di Kota Batu dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan desa wisata.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan analisa data menggunakan metode interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Dalam metode analisis ini terdapat 4 tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengembangan desa wisata mengandung 5 aspek yaitu pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata, keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif, keterlibatan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan pengembangan kemampuan penduduk lokal yang di dalamnya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat desa setempat. Dalam pengembangan tersebut terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain komitmen yang baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan ekowisata, kondisi geografis, dan pemberitaan media massa. Sedangkan faktor penghambat adalah masih kurangnya sarana prasarana di desa wisata, dan rendahnya kemampuan masyarakat Gunungsari dalam manajemen potensi wisata.

Menyadari permasalahan yang ada maka perlu dilakukan penambahan sarana-prasarana di desa wisata, penambahan wawasan perangkat desa mengenai desa wisata, serta sosialisasi dan observasi secara intens dari pihak pemerintah kepada desa wisata.

Kata kunci : Pengembangan, Ekowisata, Desa Wisata, Kota Batu

SUMMARY

Idha Zaitun Nisa Aryani Zulha, 2016 *Ecotourism Development (Community-based Ecotourism) in Batu city*, Dr. Riyanto, Drs., M. Hum as a Supervisor I, and Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS as Supervisor II.

Based on the natural potential that has a tourist attraction, in 2011 the government began to introduce the term Batu village tourism as a travel alternative that is grounded in the concept of community-based ecotourism in which the implementation of tourism activities carried out by utilizing the natural environment managed by local communities. As a tourist attraction that were overlooked its existence, tourist villages do not yet have high competitiveness when compared to other tourist objects in Batu city. That is because in terms of human resources is still low, the lack of infrastructure, as well as various regulations on tourist village that does not exist in the village / sub-district, so do a development from both government and the community to a tourist village can become a tourist attraction more good. Therefore, this study was conducted to determine community-based ecotourism development (community-based ecotourism) in Batu city and know the supporting factors and the factors inhibiting the development of rural tourism.

This research was conducted using qualitative research methods with the type of descriptive data analysis approach using interactive methods Miles, Huberman, and Saldana. In this analysis method, there are 4 stages of data collection, condensation, data presentation, and conclusion.

Development of rural tourism which contains five aspects specific marketing towards tourist destinations, skills and services to visitors intensive, community involvement, government policies, and development capability in which local residents conducted by governments and local villagers. In the development of enabling and inhibiting factors exist. The supporting factors, among others, good commitment from local governments and citizens to develop ecotourism, geographical conditions, and the mass media. While the limiting factor is the lack of facilities in the tourist village, and the low capacity Gunungsari communities in the management of tourism potential.

Recognizing the existing problems will be necessary to add infrastructure in the tourist village, enhancing the knowledge of the village on the tourist village, and socialization and intense observation from the government to the tourist village.

Keywords: Development, Ecotourism, Rural Tourism, Batu city

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat** (Studi Pada Desa Wisata Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) .

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Orang tuaku tercinta Drs. H. Nukman Yusuf dan Hj. Sitti Rugayah S.Pd yang selalu membimbing, mendukung, mendoakan, dan menginspirasi setiap hari serta mengajarkan untuk tidak pernah putus asa dalam mengejar cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya
5. Bapak Dr. Riyanto, M.Hum selaku ketua Komisi Pembimbing
6. Bapak Dr. Imam Hanafi, Msi selaku anggota Komisi Pembimbing
7. Segenap dosen dan staff Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu dan segala bantuan selama ini

8. Abang-abangku tersayang Aufa Rahman, Ardi Rahman, Aynuddin, dan Habibburahman. Terimakasih telah menjadi panutan dan penyemangat
9. Sepupu-sepupuku Fitri, Azan, Hikmah, Pipin, Rangga walaupun jarang bertemu tetapi selalu memberi semangat dan motivasi.
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan Dita, Arin, Feni, Amy, Diny, Lucky, Alwan, Bayu, Ferry, Wawan, Ozy, Eky, Rizgan, dan Zani. Terimakasih sudah menjadi saksi hidup masa-masa transisi hingga sekarang. Dan semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan sama-sama sukses
11. Teman-teman Superku di Malang Adeline, Alif, Esti, Fandi, Syamira, Gilang, Clara, Nisa, Sonya, Vonda, Errida, Citra, Ivur, Adam, Sintia, Wira, Ria, Tia, Desty, Tika, Rasty yang menemani suka duka selama 4 tahun ini. Semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang sama-sama sukses
12. Keluarga besarku di Ikatan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Brawijaya (IMPALA UB) dari (NIM.2007522/IMP) sampai dengan (NIM.2015605/IMP). Terimakasih selalu menemani, mendukung dan menghibur. BRAVO jaya selalu!
13. Seluruh teman-temanku di Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2012. Semoga kita menjadi orang-orang yang amanah dan bermanfaat bagi Negara ini.
14. Segenap pihak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang telah banyak membantu dalam proses penelitian
15. Masyarakat Desa gunungsari yang membantu dalam proses penelitian

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2016

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i



DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Terdahulu.....	11
B. Konsep Ekowisata.....	15
1. Definisi Ekowisata.....	15
2. Perspektif Ekowisata.....	17
3. Elemen Penting Ekowisata.....	18
4. Prinsip dan Kriteria Ekowisata.....	19
5. Visi dan Misi Pengembangan Ekowisata.....	26
6. Pengembangan Ekowisata.....	26
7. Strategi Program Pengembangan Ekowisata.....	32
C. Ekowisata Berbasis Masyarakat.....	32
D. Desa Wisata.....	35
1. Definisi Desa Wisata.....	35
2. Komponen Desa Wisata.....	36
3. Pengembangan Kawasan Desa Wisata.....	37
E. Pembangunan Desa.....	37
1. Definisi Pembangunan.....	37

2. Definisi Desa	38
3. Definisi Pembangunan Desa	39
4. Tujuan Pembangunan Desa.....	39
5. Prinsip Pembangunan Desa.....	40
6. Perencanaan Pembangunan Desa.....	40
7. Pelaksanaan Pembangunan Desa	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Fokus Penelitian	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian	44
D. Jenis Data dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Instrumen Penelitian	48
G. Analisis Data	49
H. Uji Keabsahan Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
1. Gambaran Umum Kota Batu	54
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	67
3. Gambaran Umum Situs Penelitian Desa Gunungsari	85
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	96
1. Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat	96
2. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata	112
C. Analisis Data dan Pembahasan	117
1. Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat	117

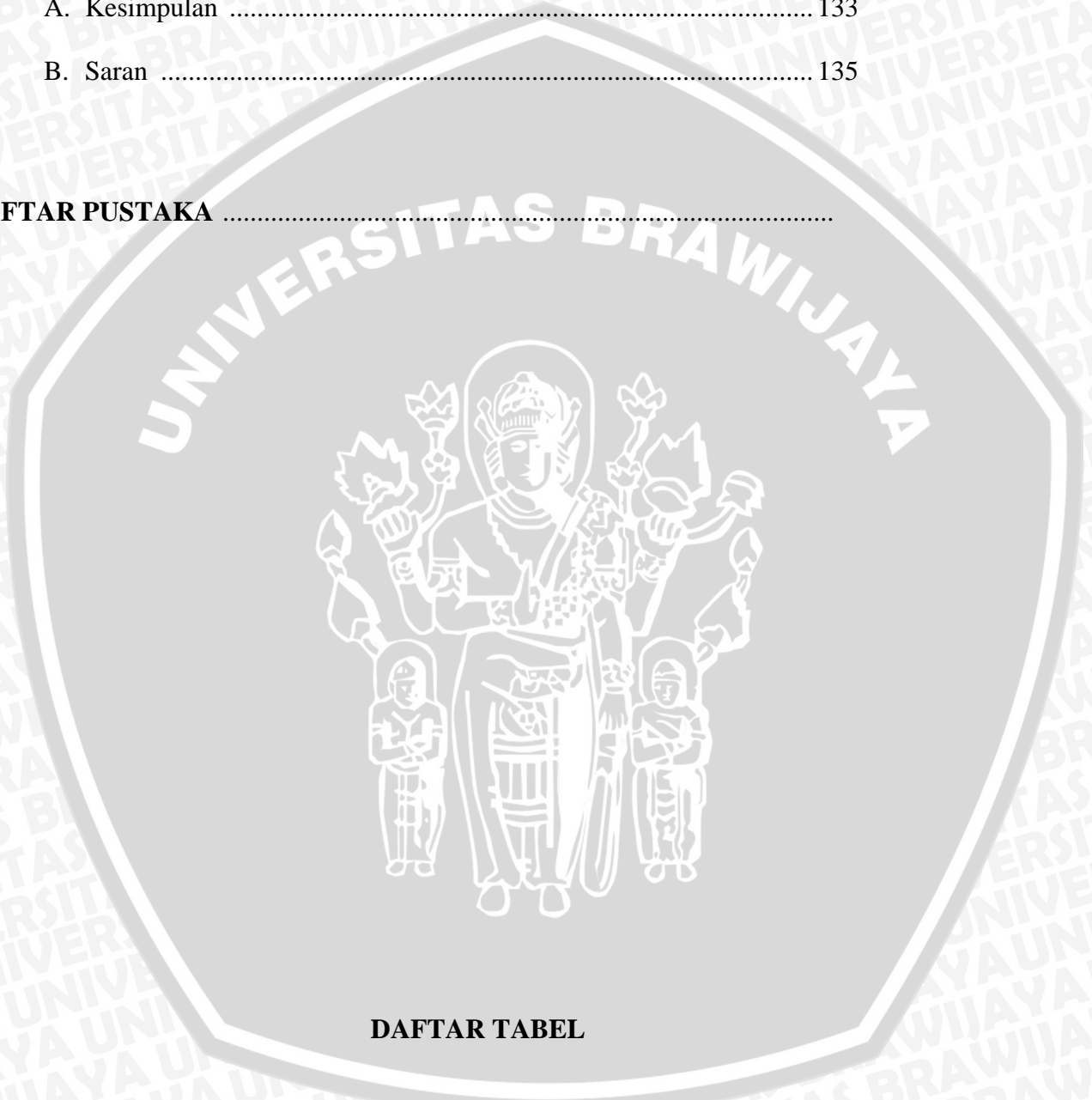
2. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata 130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 133

B. Saran 135

DAFTAR PUSTAKA



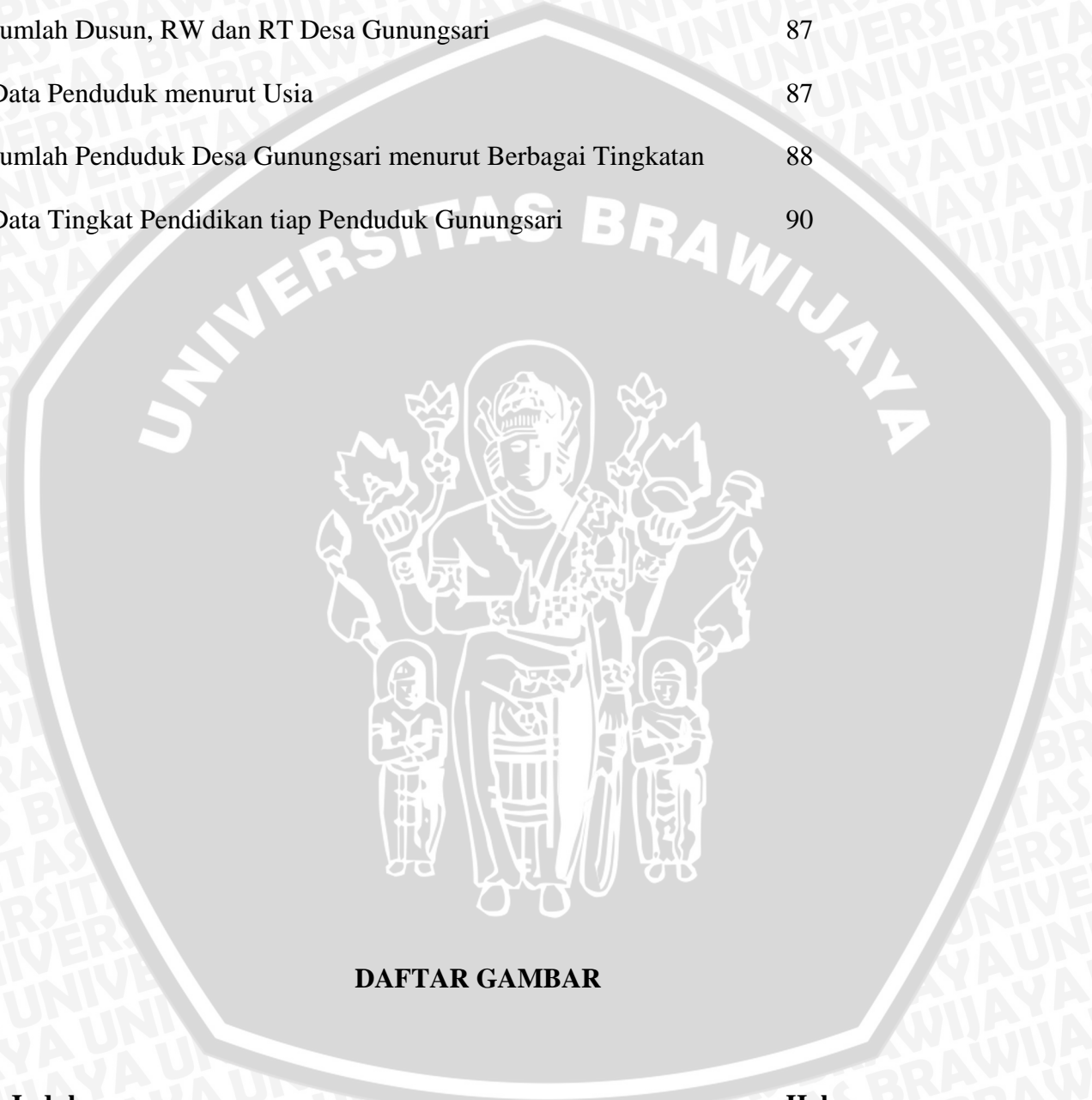
DAFTAR TABEL

No. Judul **Hal**

1. Kajian teori komponen desa wisata 36



2. Pengembangan desa wisata	37
3. Pembagian Adminnistratif Kota Batu	59
4. Jumlah Penduduk Kota Batu menurut Kecamatan	61
5. Daftar Desa dan Kelurahan di Kota Batu	64
6. Jumlah Dusun, RW dan RT Desa Gunungsari	87
7. Data Penduduk menurut Usia	87
8. Jumlah Penduduk Desa Gunungsari menurut Berbagai Tingkatan	88
9. Data Tingkat Pendidikan tiap Penduduk Gunungsari	90



DAFTAR GAMBAR

No. Judul	Hal
1. Komponen Analisis Data Model Interaktif	39
2. Peta Wilayah Kota Batu	58



3. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu	84
4. Peta Desa Gunungsari	87
5. Struktur Perangkat Desa Gunungsari	92



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul	Hal
1. Lampiran Pedoman Wawancara	137
2. Daftar Lampiran Wawancara	138
3. Lampiran Foto	139

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata pada saat ini merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Melihat keadaan potensi pariwisata yang cukup kompetitif maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penghasil devisa negara. Perkembangan pariwisata dirasakan semakin lama semakin pesat, sehingga tidak heran setiap Negara berusaha meningkatkan industri pariwisata sebagai penghasil devisa yang besar dengan kata lain, orientasi kepada masalah ekonomi,

dengan mengeksploitasi budaya serta keanekaragaman sumberdaya alam tanpa mempertimbangkan bahwa pariwisata merupakan suatu industri yang multi kompleks keberadaannya.

Pengembangan potensi sektor pariwisata seringkali dikaitkan dengan perannya sebagai salah satu kekuatan dari sumber kontribusi pemasukan pendapatan daerah, terutama dengan adanya otonomi daerah pada saat ini, dimana masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menggali potensi yang dimiliki dan mengembangkan potensi-potensi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah atau biasanya sektor pariwisata pengembangannya lebih kepada usaha peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin pembangunan di suatu daerah otonom.

Pengembangan pariwisata pada daerah tujuan wisata diharapkan dapat mampu memperhatikan kelestarian akan adat istiadat serta budaya lokal dan mampu memberikan tambahan pendapatan pada masyarakat di daerah tujuan wisata. Sesuai dengan pengertian ekologi administrasi publik, menurut Dalton E. 1970 dalam Makmur (2009,h.3) berpendapat bahwa ekologi adalah suatu konsep yang dipinjam dari bidang biologi, dimana istilah tersebut mengacu kepada studi organism dalam kaitannya dengan lingkungan. S. Pamudji 2000 dalam Makmur (2009, h.14), mengungkapkan bahwa ekologi administrasi publik berfungsi sebagai perangsang para administrator (aktor) untuk berusaha dan sekaligus menerima hasil kerja. Ekologi semacam ini merupakan lingkungan hidup administrasi public yang mempunyai faktor yang bersifat fisik alamiah dan faktor social masyarakat yang dapat menimbulkan masalah yang harus dipecahkan oleh pembuat kebijakan dan sebaliknya juga membantu mengatasi masalah tersebut. Adanya pengembangan secara fisik serta arus keluar masuk wisatawan sedikit banyak

akan membawa pengaruh pada masyarakat lokal, sehingga diperlukan perhatian sejak dini akan dampak pengembangan pariwisata di suatu daerah tempat tujuan wisata guna mewujudkan pengembangan pariwisata yang mampu menjaga kelestarian nilai budaya dan berdaya guna bagi masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menjadikan kewenangan di bidang Kepariwisataan menjadi semakin luas, baik yang terkait dengan pembinaan, pengembangan pembangunan, perijinan mampu pengawasan dan pengendaliannya. Implikasi pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Batu membawa dampak positif terhadap struktur kelembagaan pemerintah di Kota Batu. Mengingat sektor pariwisata merupakan sektor andalan perekonomian daerah, maka dengan dikembangkannya sektor pariwisata, dari penggalian potensi-potensi yang diharapkan sektor pariwisata dapat berperan sebagai *Agent of Development* untuk menunjang pembangunan sektor-sektor lainnya dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam pengembangan sektor pariwisata di Kota Batu diperlukan berbagai usaha baik yang memungkinkan dapat menambah keuangan daerah. Semakin pesatnya pembangunan pada saat ini yang mana tentunya sangat membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Dalam mengembangkan potensi wisata selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar Kota Batu khususnya.

Jenis pariwisata yang kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk dikembangkan di Indonesia saat ini adalah wisata alam, wisata cagar alam, wisata yang memperhatikan konservasi alam yang kemudian dikenal dengan konsep Ekowisata. Tujuan dari penancangan konsep tersebut adalah memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam melestarikan alam dan warisan budaya serta pengembangan Ekowisata. Ekowisata adalah konsep yang mengkonsepkan kombinasi antara kepentingan industri kepariwisataan dengan para pencinta lingkungan. Sejalan dengan konsep tersebut pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah.

Seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 Tahun 2009 tersebut akan menjamin tercapainya sasaran yakni pertumbuhan ekonomi wilayah, pengunjung memperoleh pengalaman dan keterampilan, masyarakat dan penduduk lokal memperoleh nilai tambah dan pemerintah daerah memperoleh pajak/retribusi untuk dikembalikan ke upaya konservasi. Kota Batu memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan bagi pemerintah untuk menambah pendapatan daerah. Saat ini peningkatan investasi ke dalam wilayah Kota Batu sangat signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya investor yang menanamkan modalnya guna mengembangkan objek-objek wisata di Kota Batu.

Pengembangan Ekowisata juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan wisatawan yang pada umumnya berasal dari Kota, menginginkan suasana baru di pedesaan atau di alam yang jauh dari kebisingan dan hiruk pikuk Kota. Jawa timur dengan wilayah daerah yang sangat luas, memiliki potensi berupa lahan yang cukup luas dan iklim yang mendukung untuk dikembangkannya program Ekowisata. Namun menurunnya kualitas

lingkungan hidup di Jawa Timur kian hari semakin memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya perubahan kualitas udara, air, meningkatnya aktivitas industri dan pertanian. Kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan membawa kerugian khususnya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Adapun dampak positif dengan adanya pengembangan Ekowisata ini seperti menambah pemasukan daerah yang bertujuan untuk investasi sarana dan prasarana serta melaksanakan program-program pembangunan guna mengetaskan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Selain itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat apabila masyarakat sekitar memiliki potensi bisnis dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan wisata. Akan tetapi dibalik itu semua terdapat dampak negatif jika pemerintah tidak dapat mengantisipasi berbagai masalah yang nantinya akan muncul akibat pengembangan pariwisata yang pesat tersebut antara lain adalah tergesernya sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan dan tingginya tingkat perbedaan pendapatan pada tiap masyarakat. Selain itu juga tingginya tingkat perbedaan pendapatan di tiap masyarakat, hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kecakapan beberapa kelompok masyarakat yang kurang bisa memanfaatkan peluang usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan daerah, hal tersebut terjadi karena kurangnya modal atau pengetahuan dari masyarakat itu sendiri seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar kelompok masyarakat di Kota Batu bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga kurang pengetahuan dan jaringan.

Maka dari itu, pemerintah Kota Batu sebaiknya dapat melakukan beberapa hal guna menanggulangi dampak negatif tersebut, antara lain dengan penguatan konsep Ekowisata yang perlu diintensifkan guna menciptakan sebuah model wisata baru yang dekat dengan alam serta lingkungan sosial masyarakat pedesaan. Dalam hal ini keunikan

tradisi dan kebiasaan lokal hendaknya dapat diangkat secara lebih matang di wilayah Kota Batu. Ekowisata adalah kegiatan alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Dengan dikembangkannya Ekowisata di kawasan Desa Gunungsari, menumbuhkan banyak harapan bagi masyarakat, terutama harapan untuk mendapat pekerjaan. Semakin ramainya wisatawan yang berkunjung mampu membuka kesempatan kerja yang semakin luas dan juga telah menumbuhkan harapan dan cita-cita munculnya peluang meningkatkan pendidikan, karena penambahan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak mereka sehingga anak-anak tersebut mempunyai kesempatan lebih baik di masa datang.

Peneliti memilih judul **“Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat” (Studi Pada Pengembangan Desa Wisata Gunungsari, Kecamatan Bumiaji Kota Batu)** karena di semua daerah di Indonesia memiliki potensi wisata tidak terkecuali di Kota Batu. Sudah terlihat bagaimana daya tarik Kota Batu sebagai tujuan beberapa pariwisata yang dituju. Dengan adanya perwujudan desa Ekowisata ini bisa meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi desanya sendiri. Peneliti beranggapan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan potensi alami yang dimiliki setiap daerah bahkan setiap desa yang ada di Kota Batu. Hal ini menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu ?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang diajukan di atas, tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan Ekowisata berbasis masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat yang terdapat di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih positif, adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi penulis adalah hasil penelitian ini diharapkan memberi wawasan dan pengetahuan penulis tentang daya tarik kepariwisataan,

meningkatkan simpati dan empati untuk berpartisipasi terhadap inovasi pengembangan ekowisata dan melatih kemampuan penulis dalam menganalisis permasalahan di masyarakat.

- b. Bagi Fakultas Ilmu Administrasi adalah sebagai bahan referensi untuk membandingkan antara peneliti serupa dengan peneliti yang tertarik untuk mengembangkan tema dan permasalahan yang sama.
- c. Bagi Institusi adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masing-masing pemegang kebijakan yang nantinya diharapkan dapat berpengaruh bagi perbaikan jalannya kebijakan inovasi pengembangan kepariwisataan di Dinas Pariwisata Kota Batu.
- d. Bagi Masyarakat adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi masyarakat agar tidak apatis terhadap kebijakan pemerintah dan ikut aktif berpartisipasi dalam implementasinya. Disamping itu, penelitian ini nantinya bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian yang mengambil topik sejenis.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu gambaran dan masukan untuk Dinas Pariwisata Kota Batu dalam rangka mengembangkan potensi kepariwisataan di wilayahnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang menjabarkan alasan yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah adalah permasalahan yang ditimbulkan oleh topik yang diangkat, tujuan merupakan uraian hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian adalah pernyataan mengenai manfaat dari hasil penelitian secara lebih spesifik dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menampilkan kerangka teori sebagai landasan yang digunakan dalam penyelesaian masalah yang terdiri dari tinjauan tentang pengembangan kapasitas dan kelembagaan sektor publik dan kebijakan lingkungan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan. Metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang perlakuan data dan menggambarkan masalah yang terjadi pada tahap analisis yang kemudian diinterpretasikan melalui teori yang terkait, sehingga tujuan peneliti dapat tercapai.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari semua yang telah dibahas oleh peneliti, serta memberikan saran yang dianggap perlu dengan tujuan kearah yang positif.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Studi Terdahulu

Beberapa studi terdahulu dibawah menyatakan bahwa inovasi dalam rangka pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Contohnya sebagai berikut :

1. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Suwandana tahun 2012, bahwa dari penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Petani Rumput Laut dalam Pengembangan Ekowisata di Desa Lembongan, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung”. Menganalisis bentuk dan peran pelaku pariwisata yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di Nusa Lembongan dengan

mengkaji permasalahan yang terjadi adalah peran petani yang termagimalkan sebagai petani rumput laut akibat ketidakberdayaan dalam partisipasi aktif kegiatan ekowisata di Nusa Lembongan. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa pemberdayaan petani rumput laut memerlukan peran yang dibentuk melalui kemitraan agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi lingkungan sekitar serta masyarakat.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti lingkungan dengan konsep ekowisata sebagai pariwisata berbasis masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan, lokasi dan objek penelitian. Dalam penelitian ini permasalahan yang diformulasikan berupa penyebab terjadinya konflik dalam pengelolaan ekowisata yang melatarbelakangi pemberdayaan masyarakat, bentuk-bentuk konflik, dan implikasi konflik dalam pengelolaan ekowisata yang melatarbelakangi pemberdayaan masyarakat.

2. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Sudarmayasa tahun 2012 bahwa dari penelitiannya yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Krayan Induk dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Klayon Mentarang Kalimantan Timur". Penelitian ini menggunakan kajian tulisan terdahulu serta konsep-konsep yang ada hubungannya dengan ekowisata yang berbasis masyarakat, daya tarik wisata, partisipasi masyarakat, teori konflik, dan teori partisipasi serta metode deskriptif kualitatif. Sumber daya manusia di taman nasional cukup banyak yang bekerja di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan. Permasalahan dalam penelitian ini

adalah terjadinya tarik ulur antara komponen masyarakat dengan pihak pengelola atas manfaat Taman Nasional Karyan Mentarang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat besar dalam mendukung keberadaan taman nasional dan berusaha mengenalkan wilayahnya yang berada di kawasan taman nasional. Penelitian ini dapat dijadikan acuan terkait dengan penggunaan teori yang sama yaitu teori pemberdayaan masyarakat.

3. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Budiarti tahun 2005 bahwa dari penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Pengembangan Ekowisata di Kawasan Hutan Mangrove Benoa Bali”. Penelitian ini mengkaji tentang keterlibatan serta manfaat yang diperoleh masyarakat lokal dengan adanya pengelolaan dan pengembangan di kawasan hutan mangrove Benoa yang merupakan bentuk pemanfaatan yang sesuai dengan konsep Taman Hutan Raya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran *stakeholders* dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata di kawasan hutan mangrove Benoa masih belum optimal, dan belum terkoordinasi dengan baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran *stakeholders* dan masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengelolaan dan pengembangan di kawasan Hutan Mangrove supaya bermanfaat terutama manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dengan penggunaan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dijadikan sebagai pembanding kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata.
4. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Mochamad Widjanarko dan Dian Wismar'ain tahun 2011 bahwa dari penelitiannya yang berjudul

“Identifikasi Sosial Potensi Ekowisata Berbasis Peran Masyarakat Sekitar” memaparkan mengenai ekowisata yang masih kurang efektif karena lemahnya kerja sama antar pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Desa Colo, Kabupaten Kudus memahami mengenai potensi ekowisata yang dimiliki daerahnya. Hasil dari penelitian ini adalah Desa Colo sudah memiliki kegiatan yang mengarah kepada ekowisata, namun masyarakat sekitar belum berencana untuk menjual kegiatan tersebut kepada wisatawan. Selain itu diketahui bahwa belum ada peraturan mengenai pengelolaan kawasan alam Muria yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa terkait. Penelitian ini dapat diajukan sebagai acuan peneliti karena berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pengembangan ekowisata.

5. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Dias Satria tahun 2009 bahwa dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengetasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang” memaparkan mengenai potensi dan pengembangan wisata di Pulau Sempu sebagai kawasan ekowisata. Tujuan penelitian tersebut dilakukan adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai gambaran praktek ekowisata di Pulau Sempu dan kemudian merencanakan langkah berikutnya bagi masyarakat yang terlibat dalam pengembangannya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti dengan kesamaan mengangkat permasalahan ekowisata.

Berdasarkan pemaparan studi terdahulu diatas, maka peneliti akan meneliti tentang pengembangan desa wisata gunungsari sebagai perwujudan ekowisata berbasis masyarakat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

B. Konsep Ekowisata

1. Definisi Ekowisata

Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, member manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat (Fandeli dan Mukhlison, 2005).

Ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya dalam pengelolaan yang konservatif sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat (Dirjen Pariwisata, 1995). Masyarakat ekowisata Indonesia pada tahun 1977 mendefinisikan ekowisata sebagai suatu kegiatan perjalanan wisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami dimana tujuannya untuk menikmati keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan ekowisata.

Batasan tentang ekowisata juga diberikan oleh beberapa organisasi atau pakar luar Negeri seperti :

- a. Australian National Ecourism Strategy, 1994 :

Ekowisata adalah wisata berbasis alam yang berkaitan dengan pendidikan dan pemahaman lingkungan alam dan dikelola dengan prinsip berkelanjutan

- b. Alam A. Leq, Ph.D the Ecotourism Market in The Asia Pacific Region, 1996 :

Ekowisata adalah kegiatan petualangan, wisata alam, budaya dan alternatif yang mempunyai karakteristik.

- c. Hector Cebollos Lascuarin, 1987

Ekowisata adalah wisata ke alam perawan yang relatif belum terjamah atau tercemar dengan tujuan khusus mempelajari, mengagumi, serta perwujudan bentuk budaya yang ada didalam kawasan tersebut

Ekowisata yang berasaskan konservasi terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya merupakan prinsip yang penting dalam visi ekowisata, ditambah dengan pemberdayaan masyarakat lokal dan pembangunan ekonomi kerakyatan dapat menjadi landasan pengembangan untuk merumuskan misi. Misi ekowisata dapat dijabarkan melestarikan alam dengan mengkonversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penciptaan lapangan kerja setempat, pengembangan ekonomi kerakyatan serta peningkatan pendapatan lokal maupun regional secara adil, dapat dirumuskan sebagai strategi pengembangan ekowisata yang menentukan kewilayahannya berlandaskan ekosistem dan kesatuan pengelolaannya.

2. Perspektif Ekowisata

Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumberdaya pariwisata. Berdasarkan Damanik dkk. (2006) selanjutnya disebutkan ada tiga perspektif ekowisata yaitu :

- a. Ekowisata sebagai produk yaitu semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam.
- b. Ekowisata sebagai pasar yaitu perjalanan diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan.
- c. Ekowisata sebagai pendekatan pengembangan yaitu metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan.

3. Elemen Penting Ekowisata

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2009), ekowisata memiliki banyak definisi, yang seluruhnya berprinsip pada pariwisata yang kegiatannya mengacu pada 5 (lima) elemen penting, yaitu :

- a. Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Pendidikan diberikan melalui pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan, sedangkan pengalaman diberikan melalui kegiatan-kegiatan wisata yang kreatif disertai dengan pelayanan yang prima.
- b. Memperkecil dampak negative yang bias merusak karakteristik lingkungan dan kebudayaan pada daerah yang dikunjungi.

- c. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
- d. Memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, kegiatan ekowisata harus bersifat profit (menguntungkan).
- e. Dapat terus bertahan dan berkelanjutan.

Berdasarkan dari elemen ekowisata tersebut, terdapat beberapa cakupan ekowisata yaitu untuk edukasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, serta upaya dalam kegiatan konservasi.

4. Prinsip dan Kriteria Ekowisata

Pengembangan Ekowisata di dalam hutan yang tidak mengenal kejenuhan pasar, dapat menjadikan wisata alam sebagai salah satu tujuan wisata. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata harus mengacu pada prinsip-prinsip ekowisata, untuk mencapai keberhasilan ekowisata dalam mempertahankan kelestarian dan pemanfaatan (Fandeli, 2005).

Menurut Damanik dkk. (2006), prinsip-prinsip ekowisata antara lain :

- a. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata.
- b. Mengembangkan kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya dengan tujuan wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal, maupun pelaku wisata lainnya.
- c. Menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat, melalui kontak budaya yang lebih intensif dan

kerjasama dalam pemeliharaan atau konservasi daerah tujuan objek ekowisata.

- d. Memberikan keuntungan financial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan.
- e. Memberikan keuntungan financial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal, dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal.
- f. Memberikan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan dan politik di daerah tujuan wisata.
- g. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, serta tunduk kepada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

Dalam pengembangan ekowisata, diperlukan sebuah dukungan khusus dalam pengadaan sebuah produk wisata, yang dapat menjadi bahan pertimbangan wisatawan. Wisatawan dengan minat khusus, umumnya memiliki latar belakang intelektual yang lebih baik, pemahaman serta kepekaan yang lebih terhadap etika, moralitas, dan nilai-nilai tertentu, sehingga bentuk dari wisata ini adalah untuk mencari pengalaman baru (Fandeli dkk.,2005).

Secara umum, basis pengembangan wisata minat khusus menurut Fandeli dkk. (2005), yaitu :

- a. Aspek alam seperti flora, fauna, fisik geologi, vulkanologi, hidrologi, hutan alam atau taman nasional.
- b. Objek dan daya tarik wisata budaya yang meliputi budaya peninggalan sejarah dan budaya kehidupan masyarakat. Potensi ini selanjutnya dapat dikemas dalam bentuk wisata budaya peninggalan sejarah, wisata pedesaan dan sebagainya. Wisatawan memiliki minat untuk terlibat langsung dan berinteraksi dengan budaya masyarakat setempat, serta belajar berbagai hal dari aspek-aspek budaya yang ada.

Prinsip, pengembangan dan kriteria Ekowisata yang disusun oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Ecotourism Network (INDECON), yang secara konseptual menekankan beberapa prinsip dasar, yaitu :

- a. Prinsip Konservasi yaitu pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi atau berkontribusi untuk memperbaiki sumberdaya alam. Prinsip konservasi alam diartikan sebagai memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam serta dalam pengembangannya harus mengikuti kaidah ekologis. Prinsip konservasi alam memiliki tujuh kriteria :

- 1) Memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan daerah tujuan wisata (DTE) melalui zonasi
 - 2) Mengelola dan menciptakan kegiatan wisata yang berdampak rendah dan ramah lingkungan
 - 3) Menyisihkan hasil keuntungan untuk kegiatan konservasi dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia setempat
 - 4) Menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan pengunjung, sarana dan fasilitas
 - 5) Mengembangkan kegiatan interpretasi untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi para pelaku dan pengunjung terhadap lingkungan alam dan budaya.
 - 6) Melakukan monitoring kegiatan untuk meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkan
 - 7) Mengelola usaha secara sehat.
- b. Prinsip Konservasi Budaya. Konservasi budaya memiliki prinsip peka dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. Prinsip konservasi budaya memiliki tiga kriteria :
- 1) Melakukan penelitian dan mengenakan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat sebagai bagian terpadu dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata
 - 2) Melakukan pendekatan, meminta saran-saran dan mencari masukan dari tokoh/pemuka masyarakat setempat pada tingkat paling awal sebelum memulai langkah-langkah dalam proses pengembangan ekowisata

3) Menerapkan kode etik ekowisata bagi wisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata, yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan tradisi setempat.

c. Prinsip Ekonomi. Pengembangan ekowisata harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya setempat, dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang dibangun yang seimbang antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan kepentingan semua pihak. Prinsip ekonomi memiliki dua kriteria :

- 1) Membuka kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berusaha dan menjadi pelaku-pelaku ekonomi kegiatan ekowisata baik secara aktif maupun pasif
- 2) Memberdayakan masyarakat dalam upaya meningkatkan usaha ekowisata untuk kesejahteraan penduduk setempat.

d. Prinsip Edukasi. Pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah perilaku atau sikap seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam, lingkungan dan budaya. Prinsip edukasi memiliki lima kriteria :

- 1) Mengoptimalkan keunikan dan kekhasan daerah sebagai daya tarik wisata
- 2) Memanfaatkan dan mengoptimalkan pengetahuan tradisional yang berbasis pelestarian alam dan budaya serta nilai-nilai yang dikandung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai nilai tambah

- 3) Mengoptimalkan peran masyarakat sebagai interpreter lokal dari produk ekowisata
- 4) Memberikan pengalaman yang berkualitas dan bernilai bagi pengunjung
- 5) Dikemas dalam bentuk dan teknik penyampaian yang komunikatif dan inovatif

e. Prinsip Wisata. Pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan dan memberikan pengalaman yang orisinal kepada pengunjung, serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan. Prinsip wisata memiliki lima kriteria :

- 1) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan kegiatan kesehatan keamanan dan keselamatan di lapangan.
- 2) Menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan pengunjung, kondisi setempat dan mengoptimalkan kandungan material lokal
- 3) Memprioritaskan kebersihan dan kesehatan dalam segala bentuk pelayanan, baik fasilitas maupun jasa
- 4) Memberikan kemudahan pelayanan jasa dan informasi yang benar
- 5) Memprioritaskan keramahan dalam sikap pelayanan

f. Prinsip Partisipasi Masyarakat. Perencanaan dan pengembangan harus melibatkan masyarakat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat. Prinsip partisipasi masyarakat memiliki beberapa kriteria :

- 1) Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses perencanaan dan pengembangan ekowisata
- 2) Membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk mendapat keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata
- 3) Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan
- 4) Meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan ekowisata
- 5) Mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat kebocoran pendapatan (leakage) serendah-rendahnya.
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat

(Sumber : Haris Sutan Lubis, 2008)

5. Visi dan Misi Pengembangan Ekowisata

- a. Konservasi alam, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
- b. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam lapangan usaha kerja ekonomi kerakyatan

6. Pengembangan Ekowisata

Peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengoperasionalkan pengembangan ekowisata yang dilandasi prinsip-prinsip sesuai dengan Peraturan

repository.ub.ac.id

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, dalam Pasal 2 yaitu :

- a. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata.
- b. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam yang digunakan untuk ekowisata.
- c. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.
- d. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
- e. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung.
- f. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan, dan
- g. Menampung kearifan lokal.

Melalui Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah dapat menjamin tercapainya sasaran yaitu pertumbuhan ekonomi wilayah, pengunjung memperoleh pengalaman dan keterampilan, masyarakat dan penduduk lokal memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan, swasta memperoleh

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

nilai tambah dan pemerintah daerah memperoleh pajak/retribusi untuk dikembalikan ke upaya-upaya konservasi.

Seiring dengan berkembangnya tujuan-tujuan ekowisata diluar taman nasional atau otoritas kementerian, serta semangat pembangunan otonomi daerah, sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 pelaku usaha ekowisata dapat berbentuk perseorangan dan/atau badan hukum, atau pemerintah daerah, atau kerja sama diantara mereka. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pengendalian melalui pemberian izin, pengembangan ekowisata, pemantauan pengembangan ekowisata, penertiban atas penyalahgunaan izin pengembangan ekowisata, dan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan ekowisata. Pengendalian ekowisata dilakukan antara lain terhadap fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis, dan kelestarian kawasan ekowisata.

Kegiatan ekonomi kepariwisataam terkait dengan usaha pariwisata. Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 14, usaha pariwisata meliputi, antara lain :

- a. Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- b. Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

- c. Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- d. Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- e. Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, boga, dan bar/kedai minum.
- f. Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan, caravan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkupnya berupa kegiatan usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bago suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

- i. Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau elektronik.
- j. Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- k. Jasa pramuwisata usaha yang menyediakan dan/ atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau kebutuhan biro perjalanan
- l. Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
- m. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan minuman/makanan sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Secara formal pengembangan pariwisata yang berbasis komunitas ini merupakan kebijakan resmi pemerintah sebagaimana tersirat dalam prinsip kepariwisataan Indonesia yang dirumuskan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang mencakup prinsip :

- a. Masyarakat sebagai kekuatan dasar

- b. Pariwisata ; dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, serta
- c. Pariwisata adalah kegiatan seluruh lapisan masyarakat, sedang pemerintah hanya merupakan fasilitator dari kegiatan pariwisata.

Sedangkan realisasi dari prinsip ini tertuang di dalam 7 program pokok dalam kaitannya dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata yang terdiri dari :

- a. Pengembangan Ekowisata
- b. Desa Wisata
- c. Pariwisata inti rakyat
- d. Kemitraan
- e. Pengembangan usaha rakyat kecil
- f. Pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata, dan
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

7. Strategi Program Pengembangan Ekowisata

- a. Strukturisasi kewilayahan berdasarkan ekosistem dan kesatuan pengelolaan
- b. Pengembangan berkesinambungan ekosistem daratan dan perairan
- c. Meningkatkan kualitas dan fungsi pelestarian dalam kawasan hutan
- d. Pengembangan Ekowisata berkeadilan skala lokal, regional, nasional.

(Sumber : Fandeli, 2005)

C. Ekowisata Berbasis Masyarakat (*community-based ecotourism*)

Merujuk pada Dokumen Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia (2009:2), pola ekowisata berbasis masyarakat adalah pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola.

Pendapat lain mengenai ekowisata berbasis masyarakat dikemukakan oleh Schevyns dalam Jones (2005:3):

ecotourism ventures only be considered "successful" if local community have some measure of control and share equitably in the benefits. The term "community-based ecotourism" should be reserved for that ventures based on high degree of community control (and hence where communication command a large proportion of the benefits) rather than those almost holly controlled by outside operators.

“Usaha ekowisata hanya akan dianggap berhasil apabila komunitas lokal memiliki beberapa ukuran kontrol dan pembagian manfaat secara adil. Istilah “ekowisata berbasis masyarakat” seharusnya dilaksanakan untuk usaha tersebut berdasarkan dengan tingginya tingkat control (karenanya komunikasi memegang porsi yang besar dalam pemanfaatan) daripada secara penuh dikontrol oleh pihak-pihak luar”. Selain itu pendapat dari WWF International beranggapan bahwa :

community-based ecotourism takes the social dimension of ecotourism a stage further, by developing a form of ecotourism where the local community has substantial control over and involvement in, it's development and management, and a major proportion of the benefits remain within the community.

”Ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial dari ekowisata selangkah lebih lanjut, dengan membangun konsep ekowisata dimana komunitas lokal memiliki kontrol secara substansial dan keterlibatan dalam pembangunan dan manajemen, serta memiliki proporsi utama dalam kemanfaatan yang kembali lagi kepada masyarakat”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ekowisata berbasis masyarakat merupakan konsep ekowisata dengan kecenderungan melihat dimensi sosial kemasyarakatan yang ada. Sehingga masyarakat harus memiliki peran dalam pembangunan dan pengeloannya dan harus mendapatkan manfaat paling besar dari diselenggarakannya kegiatan ekowisata.

Merujuk pada kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia (2009:2), beberapa aspek kunci dalam ekowisata berbasis masyarakat adalah:

- a. Masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan pariwisata di daerahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat (nilai partisipasi masyarakat dan edukasi)
- b. Prinsip *local ownership* (pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat) diterapkan sedapat mungkin terhadap sarana dan prasarana ekowisata, kawasan ekowisata, dll (nilai partisipasi masyarakat)
- c. *Homestay* menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata (nilai ekonomi dan edukasi)
- d. Pemandu adalah orang setempat (nilai partisipasi masyarakat)
- e. Perintisan, pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata menjadi tanggungjawab masyarakat setempat termasuk penentuan biaya (*fee*) untuk wisatawan (nilai ekonomi dan wisata)

Lebih lanjut, Rudianto dan Tanaya (2014:73) mengatakan bahwa konsep ekowisata berbasis masyarakat merupakan salah satu upaya pengembangan pedesaan dalam sektor pariwisata. Lake dan Sharply dalam Rudianto dan Tanaya (2014:74)

menyatakan bahwa pariwisata pedesaan dapat muncul jika ada perilaku wisata yang muncul di wilayah pedesaan. Roberts dan Hall dalam Rudianto dan Tanaya (2014:74) menambahkan bahwa dalam pariwisata pedesaan harus ada karakter khusus yang dapat berupa budaya tradisional, budaya pertanian, pemandangan alam, dan gaya hidup yang sederhana.

D. Desa Wisata

1. Definisi Desa Wisata

Desa Wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain, seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dalam tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryati, Wiendu, 1994 dalam Rina, 2007).

Menurut Priasukmana (2001), pembangunan desa wisata bertujuan untuk :

- a. Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata dengan menyediakan obyek wisata yang alternatif
- b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar
- c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi desa
- d. Mendorong masyarakat kota yang relatif memiliki tingkat perekonomian yang mapan agar dapat berkunjung ke desa untuk berwisata (*ruralisasi*)
- e. Menumbuhkan rasa bangga bagi masyarakat desa untuk tetap tinggal di desanya serta mengurangi tingkat urbanisasi
- f. Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan orang pribumi
- g. Memperkokoh persatuan bangsa sehingga bisa mengatasi disintegrasi.

2. Komponen Desa Wisata

Tabel 1. Kajian Teori Komponen Desa Wisata

No.	Sumber teori	Komponen Desa Wisata
1	Gumelar (2010)	<ol style="list-style-type: none">1. Keunikan, keaslian, sifat khas2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung4. Memiliki peluang untuk berkembang biak dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.
2	Putra (2006)	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah setempat2. Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual3. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya4. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program Desa Wisata5. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan
3	Prasiasa (2011)	<ol style="list-style-type: none">1. Partisipasi masyarakat lokal2. Sistem norma setempat3. Sistem adat setempat4. Budaya setempat

Sumber : Hasil kajian Teori, 2013 (7-9).

3. Pengembangan Kawasan Desa Wisata

Tabel 2. Pengembangan Desa Wisata

No	Sumber Teori	Pengembangan Desa Wisata
----	--------------	--------------------------

1	Gumelar (2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat 2. Menguntungkan masyarakat setempat 3. Berskala kecil 4. Melibatkan masyarakat setempat 5. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan
2	Putra (2006)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pariwisata terintegrasi dengan masyarakat 2. Menawarkan berbagai atraksi khas 3. Akomodasi berciri khas desa setempat.

Sumber : Hasil Kajian Teori, 2013 (8-9).

E. Pembangunan Desa

1. Definisi Pembangunan

Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju kearah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan. (Sadono Sukirno: 2006; 53)

Menurut Sondang P. Siagian pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam pembinaan bangsa.

Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamdjojo, pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Beberapa pengertian pokok mengenai pembangunan, yaitu :

- a. Pembangunan merupakan proses atau perubahan yang berkesinambungan atau dengan istilah dengan tahapan

- b. Dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pembangunan maka awalnya dimulai pengembangan sektor ekonomi tanpa melalui sektor lain.
- c. Diperlunya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya
- d. Untuk pelaksanaan sebaiknya instansi-instansi kemasyarakatan seperti gotong royong, permufakatan, permusyawaratan dan lain-lain perlu diperiksa dengan seksama, akhirnya nilai-nilai positif dari hal-hal tersebut dapat dikembangkan untuk pembangunan.

2. Definisi Desa

Menurut UU Desa Pasal 1 Nomor 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Definisi Pembangunan Desa

Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan (Tjahja Supriatna, 2000:10)

4. Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan desa dalam pasal 78 RUU desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :

- a. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor-sektor yang menjadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, keluarga berencana, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap pengembangan desa swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan keserasian hubungan antara pedesaan dengan perkotaan, imbalanced kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antar berbagai program sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia. (Tjahja Supriatna, 2000:64)

5. Prinsip- prinsip Pembangunan Desa

Prinsip-prinsip pembangunan desa menurut (Tjahja Supriatna, 2000:13) adalah

- :
- Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat
 - Dinamis dan berkelanjutan
 - Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi

6. Perencanaan Pembangunan Desa

Pada pasal 79 RUU Desa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, mencakup:

- Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ditetapkan dengan peraturan desa.
- Rencana pembangunan tahunan desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

7. Pelaksanaan pembangunan desa

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa (swakelola). Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan fenomena serta pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti agar data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sebelumnya tertuang dalam bab I. Metode pada dasarnya dimaknai sebagai suatu cara yang digunakan demi mencapai tujuan, sehingga dalam suatu metode terkandung pengertian bahwa cara yang digunakan adalah sistematis dengan beberapa proses yang dilalui dengan mencapai tujuan yang diinginkan.

Suatu metode dipilih dengan memperhatikan kesesuaian dengan obyek studi atau dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Menurut Nazir (1998:14-15): “penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi, penelitian dapat diartikan sebagai pencairan

pengetahuan dan pemberitahuan secara terus menerus terhadap sesuatu, penelitian juga merupakan sesuatu percobaan yang berhati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru”.

A. Jenis Penelitian

Dalam Bungin (2001:48) diungkapkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun variabel tertentu.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh makna yang mendalam tentang suatu fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan yang berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif disini berusaha untuk melihat dan mengetahui lebih mendalam. Dalam melakukan penelitian menggunakan kualitatif, dalam Moleong (2007:4-8), seorang peneliti harus memperhatikan ciri-ciri yang mencakup: nalar ilmiah, analisa deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara serta hasil penelitian yang dirundingkan dan disepakati bersama.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007:94) ada dua tujuan penentuan fokus suatu penelitian antara lain :

1. Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak
2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Sehingga, bagi peneliti, penetapan fokus ini akan mempermudah penelitian dan mengumpulkan data.

Penentuan fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting bagi seorang peneliti dalam penulisan. Sehubungan dengan topik penelitian, maka peneliti memberi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kota Batu, meliputi :
 - a. Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata
 - b. Keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif
 - c. Keterlibatan penduduk lokal
 - d. Kebijakan pemerintah
 - e. Pengembangan kemampuan penduduk lokal
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan adanya lokasi penelitian ini diharapkan peneliti dapat melihat situasi dan

kondisi yang sebenarnya demi mendapatkan data-data yang valid serta informasi yang sesuai dengan fokus penelitian sesuai topik terkait. Lokasi penelitian demi mengkaji pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dilakukan di kota Batu, provinsi Jawa Timur.

Sedangkan situs penelitian dilakukan pada :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Jl. Sultan Agung 7B. Telp. 0341511600, Kota Batu.
2. Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis data

Berikut merupakan klasifikasi jenis data yang diperoleh penulis, yaitu :

- a. Data primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk *file-file*. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya, responden, yaitu orang yang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. (Narimawati, 2008:98).

- b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah berupa dokumen (*paper*). Paper adalah sumber data berupa dokumen yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lain (Arikunto, 2000:114). Sementara itu Sugiyono (2010:193) mengatakan bahwa “sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh penulis berupa dokumen-dokumen dan arsip baik dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, maupun perangkat desa Gunungsari.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan sebagai berikut :

1. Informan : sesuai dengan topic penelitian, maka informan yang terkait adalah pihak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, dan masyarakat di desa wisata yang bersangkutan.
2. Dokumen dan arsip : berkaitan dengan fokus penelitian tentang pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu.
3. Tempat dan Peristiwa : berkenaan dengan lokasi penelitian, baik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu maupun pada desa-desa wisata, yakni Gunungsari.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memegang peranan yang vital terhadap keberhasilan penelitian, karena dari pengumpulan data didapatkan data-data berupa informasi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan seperti yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. *Field research* (penelitian lapangan)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, yaitu pemerintah Kota Batu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Batu, serta pada objek wisata terkait yang berkaitan dengan penelitian lapangan ini, dilakukan beberapa cara, yakni antara lain :

a. *Interview* (wawancara)

Dalam proses wawancara ini pengambilan data dengan meminta keterangan langsung pada pihak yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Estberg dalam Sugiyono (2009:231) menjelaskan wawancara adalah: “ *a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa pihak di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu serta perangkat desa Gunungsari.

b. Observasi / Pengamatan

Peneliti mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat serta mengamati keadaan dan realitas dilokasi penelitian dan selanjutnya mengumpulkan data yang diperlukan. Hal ini sesuai pendapat Nasution (1991:144) bahwa observasi sebagai pengumpul data diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa ada usaha yang sengaja untuk melakukan atau mempengaruhi dan memanipulasinya.

c. Dokumentasi (mengumpulkan data)

Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari lokasi penelitian, seperti berbentuk draft perundang-undangan maupun peraturan daerah, table, daftar, dokumen pemerintah, dan sebagainya. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2010:216) mendefinisikan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun tertulis ataupun film. Dalam penelitian ini data-data yang didapatkan dari dokumentasi

adalah RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017, beserta susunan dan struktur dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

2. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Library research merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data dari literature, baik dari buku, jurnal, laporan penelitian, maupun artikel yang berhubungan dengan topik tersebut.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dapat dimaknai sebagai alat-alat yang digunakan demi memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti

Peneliti memegang peran penting dalam pengumpulan data karena merupakan subjek kegiatan penelitian ini. Sebagai instrumen yang memegang peran penting, peneliti menggunakan panca inderanya dalam melihat dan menganalisis fenomena terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Pedoman wawancara

Salah satu aspek yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah wawancara. Wawancara yang dilakukan harus sesuai dengan pedoman agar data-data yang diperoleh dari informan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan tujuan penelitian.

3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang dapat berupa alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data, seperti buku, alat perekam, maupun alat bantu lainnya.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola dan ukuran untuk dijadikan suatu kesimpulan. Jadi analisis berdasarkan pada data yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya terbuka. Menurut Patton, analisis data merupakan proses pengurutan data, mengorganisasikan ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar (Moleong, 2000:103). Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni yang pertama adalah analisis data sebelum di lapangan. Dalam tahapan ini peneliti melakukan studi pendahuluan menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan fokus penelitian. Namun fokus penelitian dalam tahapan ini masih bersifat temporer karena dapat berkembang saat dilakukan penelitian. Tahap kedua merupakan analisis data selama di lapangan, dimana pada tahapan ini analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data secara langsung melalui wawancara maupun observasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu analisis data setelah di lapangan. Analisis data setelah di lapangan yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data model Miles, Huberman dan Saldana.

Dalam melakukan analisis data kualitatif, menurut Miles, Huberman dan Saldana (2013:12) dapat melalui alur kegiatan yang meliputi :

1. Kondensasi data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus

menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan pada tahap analisa data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dalam penelitian ini, data-data yang dipilih, disederhanakan, dan ditransformasi dari lapangan bersumber dari wawancara dan data sekunder yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, perangkat Desa Gunungsari serta pengalaman pribadi peneliti.

2. Penyajian data

Penyajian diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penggunaan jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

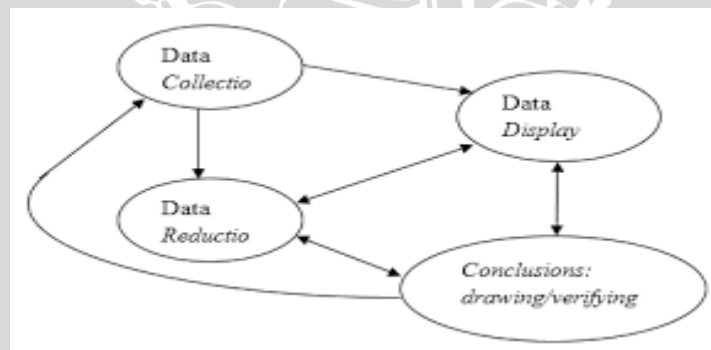
Dalam tahap ini, data yang disajikan disesuaikan dengan fokus penelitian, yakni pengembangan desa wisata yang terdiri dari 5 aspek, yaitu pemasaran yang spesifik menuju destinasi wisata, keterampilan dan layanan intensif kepada

pengunjung, keterlibatan penduduk lokal, kebijakan pemerintah, serta pengembangan kemampuan penduduk lokal. Selain itu data yang disajikan juga sesuai dengan fokus penelitian, yaitu potensi dan daya tarik sumber daya alam yang dalam pengembangan desa wisata Gunungsari sebagai perwujudan ekowisata berbasis masyarakat.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Hal ini dikarenakan makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan tidak jelas kebenaran dan kegunaannya. Inilah yang disebut validitas.

Merujuk pada uraian di atas maka dalam penyajian data dan penelitian dapat lebih terarah. Uraian analisa di atas dapat digambarkan kedalam bagan yang akan terlihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2013:14)

H. Uji Keabsahan Data

1. Uji Validitas Penelitian

Validitas dalam penelitian kualitatif adalah kepercayaan dari data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan peneliti secara akurat mempresentasikan dunia sosial di lapangan (Alsa, 2007).

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi *credibility* (validitas internal) dengan cara triangulasi, *transverbility* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *comformability* (objektifitas) (Sugiyono, 2011).

Pada penelitian ini, akan digunakan cara triangulasi dalam pengujian data, khususnya triangulasi metodologis. Triangulasi metodologis yaitu penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur, dan dokumen (Patton, 2009).

2. Dependability (Reliabilitas)

Susan Stainback, menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2011).

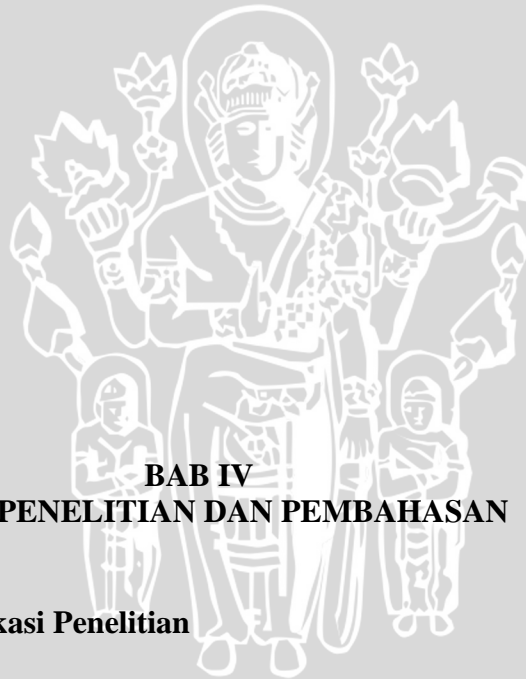
3. Objektivitas

Dalam hal ini peneliti harus berusaha sedapat mungkin memperkecil faktor subyektifitas. Penelitian akan dikatakan obyektif bila dibenarkan atau di “confirm” oleh peneliti lain. Maka obyektifitas diidentikkan dengan istilah “confirmability”.

4. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2012). Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Batu

a. Sejarah Kota Batu

Wilayah kota Batu terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan kisah-kisah orangtua maupun dokumen yang ada sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama

“BATU” mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut. Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat sebutan nama seseorang agar penyebutannya lebih cepat, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau BATU sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota dingin di Jawa Timur.

Kota Batu pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Malang, berdasarkan wawancara dengan Bapak Muljo Adji, BcKn (Kepala Seksi..... Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu):

“Awalnya Kota Batu merupakan kecamatan bagian dari wilayah Kabupaten Malang. Karena tingkat perkembangan secara perekonomian dan kemajuan yang pesat Kecamatan Batu ditetapkan sebagai Kota Administratif (Kotatif) Batu pada 6 Maret 1993 untuk dipersiapkan sebagai kota madya dan walikota pertama adalah Bapak Drs. Chusnul Arifien Damuri. Pembagian wilayahnya dibagi menjadi 3 kecamatan yaitu kecamatan Batu, Bumiaji dan Junrejo. Dalam menjalankan fungsi pembangunan, kemasyarakatan pemerintahan Kota Batu belum memiliki anggota DPRD, maka dibentuk FKMK (Forum Koordinasi Masyarakat Kota Batu) yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kalangan industry pariwisata dibantu dengan 3 dinas (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan) serta 3 camat tersebut. Perkembangan semakin pesat makan tanggal 17 Oktober 2001 Kota Administratif Kota Batu ditetapkan menjadi Kota Batu berdasar pada UU No. 11 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu” (Hasil wawancara pada hari Senin, 30 Mei 2016 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

Perkembangan Kotatif Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur terus meningkat hari demi hari, kota yang dulunya tidak selengkap kota lain sekarang hamper menyamai kota-kota lainnya. Karena perkembangan Batu cukup maju maka banyak warga dari Kotatif Batu yang ingin status kotanya ditingkatkan, organisasi-organisasi banyak didirikan untuk mendukung peningkatan status Kotatif Batu, misalnya Kelompok Kerja (Pokja) Batu, kelompok kerja ini berusaha bersama masyarakat Batu untuk meningkatkan status kotanya. Dukungan-

dukungan lainnya dari Bupati Malang, DPRD II Malang, Gubernur Jawa Timur dan organisasi masyarakat lainnya. Setelah hampir 8 tahun akhirnya Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintahan Kota Batu. Dan pada tanggal 28 Mei 2001 proses peningkatan status dilaksanakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah.

Pada tanggal 30 Juni 2001 UU No. 11 tentang peningkatan status Kota Administratif Batu disahkan, setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal 17 Oktober 2002 secara resmi Kotatiff Batu ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2002 Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Otonomi Daerah melantik Drs. Imam Kabul sebagai Walikota Batu. Setelah Batu ditingkatkan statusnya Batu ingin meningkatkan lagi pembangunannya baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sejak statusnya meningkat pemerintah Kota Batu bersama masyarakat mulai menyiapkan diri bagaimana agar pamor dan citra kota dingin ini tetap ada dan tetap dikenang banyak orang baik domestik maupun luar negeri.

b. Keadaan Geografis

Berdasarkan profil Kota Batu dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2012 – 2017, secara umum wilayah Kota Batu merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Diantara gunung-gunung yang ada di Kota Batu, terdapat 3 gunung yang diakui secara nasional, yaitu Gunung Panderman (2.010m), Gunung Welirang (3.156m) dan Gunung Arjuno (3.339m). Berdasarkan ketinggiannya, Kota Batu diklasifikasikan kedalam 6 kelas, yaitu :

- 1). 600 – 1.000 DPL dengan luas 6.019,21 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah :

- a. Kecamatan Batu (Desa Sidomulyo, secara keseluruhan sebagian besar Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik, dan Desa Sumberejo serta sebagian kecil Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan dan kelurahan Songgokerto)
- b. Kecamatan Junrejo (Desa Junrejo, Torongrejo, Pendem, Beji, Mojorejo, Dadaprejo dan sebagian Desa Tlekung)
- c. Kecamatan Bumiaji (Pada sebagian kecil dari desa-desa yang ada di Kecamatan Bumiaji)

2). 1.000 – 1.500 DPL dengan luas 6.493,64 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah sebagian besar desa-desa yang ada di Kecamatan Batu (terutama wilayah Songgokerto, Desa Oro-oro Ombo, dan Desa Psanggrahan) serta di sebagian kecil Desa Tlekung yang berada di wilayah Kecamatan Junrejo.

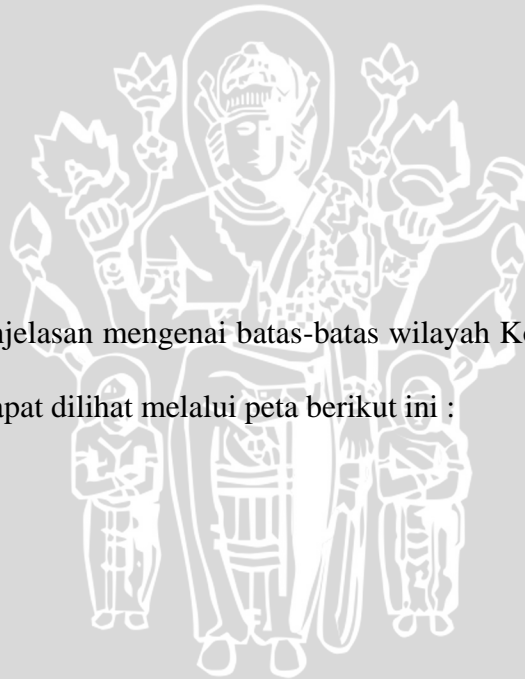
3). 1.500 – 2.000 DPL dengan luas 4.820,40 Ha

Wilayah yang termasuk dalam ketinggian ini adalah sebagian kecil Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo. Selain itu juga terdapat di sebagian kecil desa Oro-oro Ombo dan desa Psanggrahan, terutama di sekitar kawasan Gunung Panderman, Gunung Bokong, serta Gunung Punuksari.

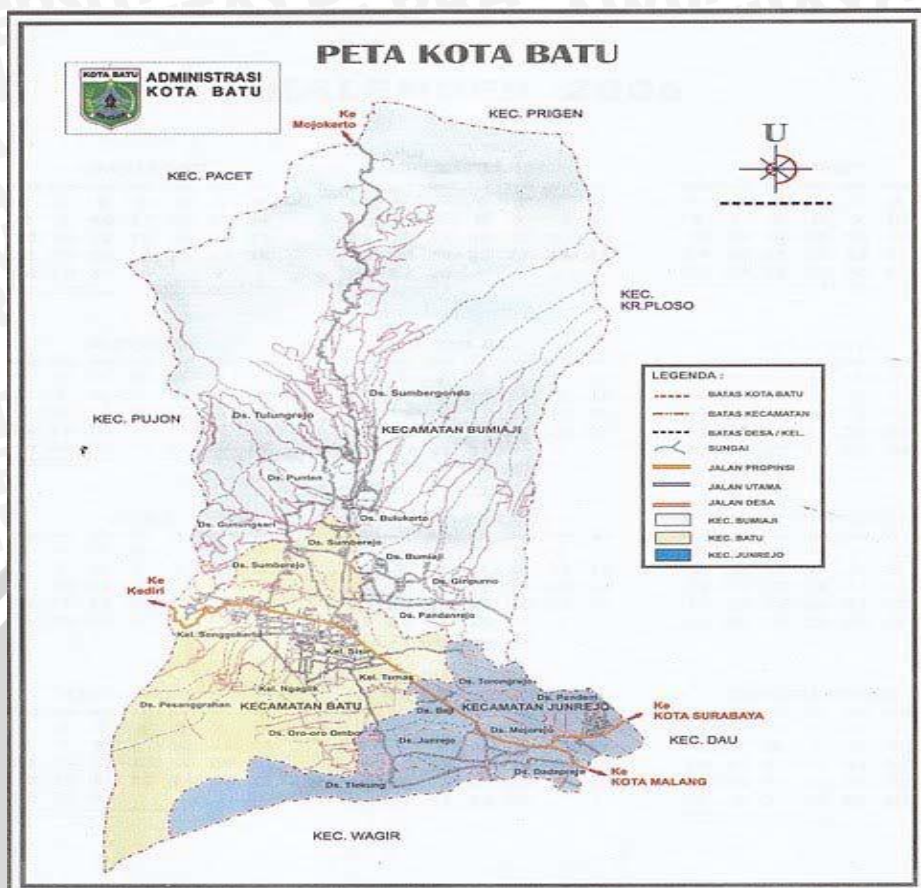
Merujuk pada RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 ditinjau dari letak astronomi, Kota Batu terletak antara $112^{\circ} 17'$ - $112^{\circ} 57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44'$ - $8^{\circ} 26'$ Lintang Selatan. Sedangkan batas wilayahnya meliputi :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Berdasarkan penjelasan mengenai batas-batas wilayah Kota Batu, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui peta berikut ini :



Gambar 2 : Peta Wilayah Kota Batu

Sumber : RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017

a. Pembagian Administratif

Berdasarkan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017, luasan wilayah Kota Batu adalah 19.908,72 hektar dan secara administrasi terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Batu

- a. Luas wilayah Kecamatan Batu : 4.545,81 hektar
- b. Jumlah Desa/Kelurahan : 4 kelurahan dan 4 desa
- c. Jumlah RW/RT : 96 RW dan 453 RT

2. Kecamatan Junrejo

- a. Luas wilayah Kecamatan Junrejo : 2.565,02 hektar
 - b. Jumlah Desa/Kelurahan : 1 kelurahan dan 6 desa
 - c. Jumlah RW/RT : 59 RW dan 240 RT
3. Kecamatan Bumiaji
 - a. Luas wilayah Kecamatan Bumiaji : 12.797,89 hektar
 - b. Jumlah Desa/Kelurahan : 9 desa
 - c. Jumlah RW/RT : 82 RW dan 429 RT

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian administratif Kota Batu, dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3. Pembagian Administratif Kota Batu

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun	RW	RT
1	Batu	4	4	15	96	457
2	Junrejo	1	6	36	83	430
3	Bumiaji	0	9	19	59	240
Kota Batu		5	19	70	238	1127

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Pemerintah Kota Batu

c. Kondisi Demografi

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 211.298 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 19,908 km² , maka kepadatan penduduk adalah sebesar 1.060 jiwa per km². Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan

kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Penduduk Kota Batu tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Hampir separuh penduduk Kota Batu bertempat tinggal di Kecamatan Batu (46,48%), sementara separuhnya lagi bertempat tinggal di Bumiaji (28,76%) dan Junrejo (24,76%). Dari sisi luas wilayah sebenarnya Kecamatan Bumiaji adalah kecamatan yang memiliki luas terbesar dibandingkan dua kecamatan lainnya. Hal ini dipahami karena secara geografis Kecamatan Batu memiliki wilayah yang relatif lebih datar dari dua kecamatan yang lain. Sementara Kecamatan Bumiaji meskipun memiliki luas wilayah paling besar tetapi kondisi geografis wilayah kecamatan ini merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar digunakan untuk wilayah pertanian dan konservasi lingkungan.

Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator yang umum dipakai adalah Rasio Kepadatan Penduduk (*density ratio*) yaitu rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun tertentu. Sehingga jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya maka Kecamatan Batu menjadi kecamatan terpadat di Kota Batu, diikuti Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Sebenarnya kepadatan Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo hampir sama. Hal ini terjelaskan dari jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Junrejo hanya separuh dari jumlah penduduk di Kecamatan Batu tetapi luas wilayahnya juga separuh dari luas wilayah Kecamatan Batu.

Indikator komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di suatu wilayah atau umum dikenal dengan *Sex-Ratio* atau Rasio Jenis Kelamin. Indikator ini juga sering digunakan untuk menyatakan banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Indikator ini dihitung sebagai

persentase rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Di Kota Batu di tiga kecamatan diatas 100 persen semua. Artinya penduduk laki-laki di Kota Batu masih lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kota Batu terbuka bagi siapa saja baik WNI maupun WNA. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu di tahun 2014 WNA atau sekitar 0.012 persen dari total penduduk yang tercatat di Dispendukcapil Kota Batu.

Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2014 adalah sebesar 1,17 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk ini tercatat mengalami sedikit kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,14 persen. Selama periode 2012 hingga 2014, pertumbuhan penduduk di Kota Batu relatif stabil. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah. Diantara ketiga kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu yang paling padat penduduknya. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk di Kecamatan Batu mencapai 2.012 jiwa per km², hal ini tidak mengherankan jika Kecamatan Batu merupakan kecamatan terpadat di Kota Batu karena di Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan pemerintahan maupun ekonomi. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang terkecil kepadatan penduduknya karena sebagian wilayah Kecamatan Bumiaji merupakan hutan dan daerah lereng gunung.

Berikut ini merupakan jumlah penduduk Kota Batu berdasarkan Kecamatan, yakni Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo.

Tabel 4. Jumlah penduduk Kota Batu menurut Kecamatan

Kecamatan	2011	2012	2013
Batu	89.442	90.358	91.081
Junrejo	47.123	47.675	48.111

Bumiaji	56.248	56.668	56.998
Jumlah	192.813	194.700	196.189

Sumber : <http://www.batukota.bps.go.id> diakses tanggal 8 juli 2016

Pada tahun 2013 kepadatan penduduk (jiwa/km²) sebesar 985 orang dengan *sex ratio* sebesar 101,68% dan laju pertumbuhan sebesar 1,12%.

d. Keadaan Iklim

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kota Batu mengikuti perubahan putaran 2 iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun 2014, hujan hampir terjadi di setiap bulan, kecuali bulan September. Rata-rata curah hujan pada tahun 2014 yang tercatat pada pengamatan yang dilakukan oleh Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso mencapai rata-rata 1.257 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 109 hari. Dan rata-rata kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 77,5 persen.

Kondisi topografi Kota Batu yang sebagian besar pegunungan dan perbukitan menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Rata-rata suhu udara selama tahun 2014 adalah 23,5 derajat celsius dengan suhu terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 22 derajat celsius.

(Sumber : Kota Batu Dalam Angka 2015)

e. Keadaan Pemerintah

Pada tahun 2014, Kota Batu terbagi habis menjadi 3 kecamatan, 19 desa/ kelurahan, 238 RW dan 1.127 RT. Dilihat komposisi jumlah Desa/kelurahan, Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu masing-masing 9 desa/kelurahan. Banyaknya jumlah desa/kelurahan yang dimiliki tidak otomatis menjadi daerah dengan jumlah RW dan RT terbanyak pula. Terbukti jumlah RW dan RT terbanyak di Kecamatan

Batu yaitu masing-masing 96 RW dan 457 RT. Berikutnya Kecamatan Bumiaji 59 RW dan 430 RT dan sisanya berada di Kecamatan Junrejo. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini tidak akan berhasil apabila desa/kelurahan sebagai satuan terkecil pemerintahan tidak pernah tersentuh pembangunan. Pada tahun 2014, hasil pembangunan di Kota Batu telah dapat dirasakan. Hal ini ditengarai dari jumlah status desa di Kota Batu yang telah mencapai tingkat swasembada yaitu sebanyak 24 desa/kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa semua desa kelurahan di Kota Batu memiliki partisipasi yang baik dan kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya.

Jumlah pegawai negeri yang mengabdikan diri di Kota Batu. Jumlah pegawai negeri sipil yang ada di Kota Batu pada tahun 2014 adalah sebanyak 4.874 orang. Sekitar 56,06 persen PNS merupakan lulusan Sarjana (S1) dan sisanya lulusan SMA ke bawah dan hanya 23,24 persen yang merupakan lulusan S2/S3. Sebagian besar PNS yang bertugas di Kota Batu adalah PNS dengan golongan III. Meningkatnya arus lalu lintas kendaraan menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Menurut data yang dikumpulkan pihak kepolisian resor Kota Batu, jumlah kecelakaan yang terjadi di Kota Batu selama tahun 2014 meningkat sebesar 38,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

(Sumber : Kota Batu Dalam Angka 2015)

Tabel 5. Daftar Desa dan Kelurahan di Kota Batu

Kecamatan Batu	Kecamatan Bumiaji	Kecamatan Junrejo
Desa Sumberejo	Desa Punten	Desa Beji
Desa Oro-oro Ombo	Desa Gunungsari	Desa Junrejo
Desa Sidomulyo	Desa Tulungrejo	Desa Tlekung
Desa Pesanggrahan	Desa Sumbergondo	Desa Mojorejo
Kelurahan Temas	Desa Pandanrejo	Desa Pendem
Kelurahan Songgokerto	Desa Bumiaji	Desa Torongrejo
Kelurahan Sisir	Desa Giripurno	Kelurahan Dadaprejo
Kelurahan Ngaglik	Desa Bulukerto	
	Desa Sumberbrantas	

Sumber : www.kotawisatabatu.com

f. Keadaan dan Potensi Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sangat kompleks karena kegiatannya yang sangat bermacam-macam sehingga harus bekerjasama untuk menciptakan produk. Kegiatan ekonomi ini sangat beraneka ragam subsektornya yang masing-masing merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang lain. Pariwisata Kota Batu merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan ke kota ini merupakan salah satu yang terbesar bersama dengan Bali dan Yogyakarta. Objek wisata Kota Batu sangat beragam dari sejarah, retail, pendidikan, hingga kawasan alam.

Wilayah kota Batu merupakan wilayah yang memiliki panorama yang indah dan sejuk serta mempunyai spesifikasi khusus yaitu dikelilingi Gunung Panderman, Gunung Banyak, Gunung Welirang, dan Gunung Bokong, sehingga wilayah ini berpotensi sebagai daerah wisata. Berdasarkan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017, terdapat banyak jenis wisata yang

ada, diantaranya wisata agro dan wisata bunga, wisata alam, wisata budaya, wisata rekreasi, wisata minat khusus, wisata religi, wisata ziarah, wisata husada, dan wisata kuliner.

1. Wisata Agro dan wisata bunga : Kota Batu memiliki ciri khas dengan agrowisatanya yang berupa apel, stroberi, sayur mayur, bahkan bunga. Objek wisata agro dan bunga antara lain Kusuma Agrowisata, Wisata agro petik bunga di Desa Gunugsari dan Desa Punten, Wisata petik apel Tulungrejo, Wisata bunga Sidomulyo, Wisata petik jeruk Desa Kungkuk dan sebagainya.
2. Wisata Alam : kondisi geografis kota Batu yang berada di dataran tinggi dan dikelilingi oleh beberapa gunung dengan udara yang sejuk memiliki daya tarik wisata alam dengan pemandangan indah khas pegunungan. Berikut ini merupakan objek-objek wisata alam, yaitu : Pemandian air panas Cangar, pemandian air panas Songgoriti, Camping Ground, TAHURA (Tama Hutan Rakyat) Junggo, Air terjun Coban Talun, dan Air terjun Coban Rais.
3. Wisata Budaya : budaya tradisional Jawa tumbuh dan berkembang dengan baik di Kota Batu. Hal tersebut menjadi salah satu potensi wisata yang menyuguhkan kekhasan tradisi yang dapat menghibur dan mengedukasi para wisatawan. Adapun wisata budaya di Kota Batu dapat dinikmati melalui atraksi Sedekah Bumi, Grebeg Desa, Tari Sembrama, Maulid Nabi Muhammad SAW, serta Dokar Wisata.
4. Wisata Rekreasi : Kota Batu memiliki beberapa objek wisata yang dibangun sebagai tempat rekreasi edukatif, diantaranya adalah Jatim Park 1, Jatim Park 2, Batu Night Spectacular (BNS), Kawasan Wisata Songgoriti, Wisata Selecta, Tirta Nirwana, Batu Wonderland, Eco green Park, Alun-alun Kota Batu, dan sebagainya.

5. Wisata Minat Khusus : Wisata minat khusus merupakan wisata yang diselenggarakan dengan tema khusus, seperti mountain bike, arung jeram, maupun olahraga paralayang. Objek-objek wisata minat khusus antara lain wisata paralayang (aero tourism), wisata arung jeram, wisata sepeda gunung, serta wisata bumi perkemahan.
6. Wisata Sejarah : beberapa situs peninggalan sejarah menjadi salah satu daya tarik wisata Kota Batu, yaitu Candi Supo Songgoriti, Patung Ganesha, Makam Tuan Denger, Wisma Bima Sakti Selektta, Kartika Wijaya (Heritage Hotel), Goa Jepang Cangar, Goa Jepang Tlekung
7. Wisata Religi : Seni arsitektur bangunan tempat peribadatan agama di Kota Batu menjadi salah satu potensi wisata yang bersifat religi. Keberadaan bangunan dan tempat ibadah di Kota Batu masih terjaga dan terawat dengan baik sehingga patut dijadikan destinasi wisata. Adapun objek wisata religi adalah Masjid An-Nur, Gereja Tua Jago, Puri Luhur Giri Arjuno, Vihara Budha Kertarajasa, dan Klenteng Dewi Kwam Im Thong.
8. Wisata Ziarah : Wisata ini identik dengan kunjungan wisatawan ke makam-makam yang dikeramatkan, diantaranya adalah Makam Pesarehan Mbah Wastu yang terletak di Bumiaji dan Makam Pesarehan Mbah Pathol yang konon adalah tokoh yang membuka wilayah atau babat alas daerah Songgoriti.
9. Wisata Husada : wisata ini sangat diminati oleh wisatawan yang memiliki ketertarikan pada tanaman obat herbal (tanaman toga) seperti kunir, jahe, temulawak, dan sebagainya. Objek wisata husada terletak di Balai Materia Medika.

10. Wisata Kuliner : terdapat banyak sekali tempat yang menyajikan ragam makanan di Kota Batu, mulai dari penjual makanan pinggir jalan yang salah satunya tersebar di sekitar Alun-alun Kota Batu sampai pada café dan restoran terkemuka di Kota Batu.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kota Batu. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

a. Visi dan Misi

Dalam mewujudkan tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, terdapat visi dan misi, yakni :

1. Visi Kota Batu

Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional ditunjang oleh pendidikan yang tepatguna dan berdaya saing ditopang oleh sumberdaya (alam, manusia dan budaya) yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Terwujudnya Kota Batu Sebagai Kota Kepariwisataan Internasional.

3. Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Untuk mewujudkan visi yang tersebut diatas, maka perlu dijabarkan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing di tingkat global
3. Mengembangkan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata yang berbasis potensi dan masyarakat
4. Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder pariwisata baik di tingkat regional, nasional dan internasional
5. Melakukan promosi pariwisata secara kontinyu baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional

b. Tugas Pokok, Fungsi, dan Tujuan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu dan Peraturan Walikota Batu Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan strategis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2. Pengumpulan dan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan
4. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata dan kebudayaan
5. Penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan
7. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan dan Pariwisata
8. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9. Pembinaan UPTD
10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang seni budaya dan pariwisata
12. Pembinaan kepada masyarakat tentang pariwisata, hiburan dan kebudayaan
13. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya
14. Peningkatan pengembangan apresiasi seni budaya
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Adapun fungsi dari Kepala Dinas adalah :

1. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan;
2. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. perencanaan dan pengendalian anggaran;
4. pengendalian urusan administrasi Dinas;
5. pembinaan pengembangan produk pariwisata;
6. pembinaan promosi dan pemasaran pariwisata;
7. pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
8. pembinaan pengembangan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah, dan purbakala.
9. penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan, serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
10. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama bidang pariwisata dan kebudayaan di antara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
11. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan rencana kerja Dinas, mengendalikan administrasi keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas. Adapun fungsi dari sekretariat adalah :

1. Perumusan rencana kerja Sekretariat;
2. Pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
3. Pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas;
4. Pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
5. Pembinaan dan pengembangan pegawai;
6. Pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
7. Pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun fungsi dari Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah :

1. Penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;

2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
6. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
7. Pengelolaan data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola anggaran dan administrasi keuangan Dinas. Adapun fungsi dari Sub Bagian Keuangan adalah :

1. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
2. pelaksanaan verifikasi SPP;
3. penyiapan Surat Perintah Membayar;
4. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
5. penyusunan laporan keuangan Dinas;
6. penyusunan administrasi dan teknis pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola ketatalaksanaan dan ketatausahaan, meliputi administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga, barang milik daerah, perpustakaan, dan kearsipan. Adapun fungsi dari Sub bagian umum dan Kepegawaian adalah :

1. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian;
2. pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
3. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
4. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
5. pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
6. pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan pengembangan produk pariwisata. Adapun fungsi dari Bidang Pengembangan Produk Pariwisata adalah :

1. perumusan rencana kerja Bidang;
2. penyusunan pedoman teknis program kegiatan
3. pengembangan produk pariwisata;
4. pembinaan potensi usaha kepariwisataan;

5. pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum;
6. pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek serta daya tarik wisata;
7. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;
8. pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata;
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas menyusun rencana, mengolah data, membina, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengembangan objek dan daya tarik pariwisata. Adapun fungsi dari Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata adalah :

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pendataan dan pemetaan informasi potensi daya tarik wisata, atraksi wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
3. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pengembangan objek dan daya tarik wisata, atraksi wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
4. pelaksanaan fasilitasi teknis kerja sama perusahaan objek dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum;

5. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis penataan dan pelestarian lingkungan bagi usaha objek dan daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, membina, memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi usaha jasa dan sarana wisata. Dalam menyelenggarakan tugas ada beberapa fungsi dari seksi usaha jasa dan sarana pariwisata sebagai berikut :

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pendataan dan pemetaan data informasi usaha akomodasi, usaha makanan dan minuman penunjang pariwisata, jasa angkutan wisata, sarana wisata, kawasan wisata, dan usaha jasa pariwisata;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) usaha jasa pariwisata;
4. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis usaha akomodasi, usaha makanan dan minuman penunjang pariwisata, jasa angkutan wisata, sarana wisata, kawasan wisata, dan usaha jasa pariwisata;
5. penyusunan rekomendasi persyaratan administrasi dasar klasifikasi hotel dan restoran usaha makanan dan minuman penunjang pariwisata, jasa angkutan wisata, sarana wisata, kawasan wisata, dan usaha jasa pariwisata;

6. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerja sama kemitraan usaha akomodasi, usaha makanan dan minuman, jasa angkutan wisata, sarana wisata, kawasan wisata, dan usaha jasa pariwisata;
7. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata. Adapun fungsi dari bidang promosi dan pemasaran adalah :

1. perumusan rencana kerja Bidang;
2. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan promosi, pemasaran, dan kerja sama kebudayaan dan pariwisata;
3. perumusan Rencana Induk Pengembangan pariwisata (RIPP) skala daerah;
4. pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata;
5. pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi wisata;
6. pembinaan pameran/event kebudayaan dan pariwisata;
7. pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata;
8. perumusan branding (merek) dan tagline (slogan) pariwisata;
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan

10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Informasi dan Analisa Pasar mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, menganalisis, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan informasi pariwisata dan analisa pasar pariwisata. Adapun fungsi dari seksi informasi dan analisa pasar adalah :

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pendataan dan pemetaan data informasi pariwisata dan analisa pasar pariwisata;
3. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP);
4. pengelolaan teknis manajemen sistem informasi pariwisata;
5. pengelolaan pusat pelayanan informasi pariwisata;
6. penyusunan analisis pasar kebudayaan dan pariwisata;
7. pelaksanaan fasilitasi pengembangan potensi pasar pariwisata baik dalam maupun luar negeri;
8. pengelolaan survey potensi budaya dan pariwisata;
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, menganalisis, membina, monitoring dan evaluasi program kegiatan promosi kepariwisataan dan Kerja Sama pariwisata dan kebudayaan.

Adapun fungsi dari seksi promosi dan kerja sama adalah :

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pendataan dan pemetaan data informasi pariwisata lokal dan unggulan serta kerja sama pemasaran wisata;
3. penyusunan pedoman teknis pengembangan promosi dan destinasi wisata;
4. pelaksanaan fasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional pengembangan destinasi wisata;
5. pengelolaan teknis kegiatan pameran/event budaya dan pariwisata;
6. pengelolaan teknis administrasi penetapan branding (merek) pariwisata dan tagline (slogan) pariwisata;
7. pelaksanaan fasilitasi program pertukaran budaya dan pariwisata;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Adapun fungsi dari bidang pengembangan sumber daya manusia adalah :

1. perumusan rencana kerja Bidang;
2. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
3. pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
4. penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata;
5. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
6. penyusunan teknis kerja sama dengan instansi terkait di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bimbingan dan Pelatihan mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, menganalisis, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan. Adapun fungsi dari seksi bimbingan dan pelatihan adalah :

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pendataan dan pemetaan data informasi potensi dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
3. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan;
4. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis sanggar, organisasi, dan pelaku seni dan budaya;

5. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis kompetensi profesi sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, menganalisis, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pengembangan pariwisata. Adapun fungsi dari seksi peran serta masyarakat adalah :

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pendataan dan pemetaan data informasi potensi peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
3. pelaksanaan fasilitasi pembinaan program masyarakat sadar wisata;
4. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis
5. pengembangan sumber daya masyarakat pariwisata;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan bidang kebudayaan. Adapun fungsi dari bidang kebudayaan adalah :

1. perumusan rencana kerja Bidang;
2. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan kebudayaan, keurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
3. penyusunan teknis kerja sama regional, nasional dan internasional di bidang kebudayaan, keurbakalaan, nilai tradisional, kesenian, perfilman dan sejarah;
4. pembinaan inventarisasi dan dokumentasi di bidang kebudayaan, keurbakalaan, nilai tradisional, kesenian, perfilman dan sejarah;
5. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
6. pengendalian perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian, Benda Cagar Budaya (BCB), dan situs warisan budaya;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pembinaan dan perlindungan nilai-nilai sejarah dan keurbakalaan. Adapun fungsi dari seksi sejarah dan keurbakalaan adalah :

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;

2. pendataan dan pemetaan data informasi
3. peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan budaya daerah;
4. penyusunan pedoman penelitian arkeologi dan pengelolaan museum;
5. pengelolaan data inventarisasi dan dokumentasi sumber dan publikasi sejarah dan kepurbakalaan;
6. pelaksanaan fasilitasi pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
7. pengelolaan sistem informasi geografi sejarah;
8. pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) situs warisan budaya daerah dan hasil pengangkatan peninggalan bawah air;
9. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pemahaman nilai kepurbakalaan bagi masyarakat;
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Nilai-Nilai Tradisional mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan perlindungan nilai-nilai tradisional daerah. Adapun fungsi dari seksi nilai tradisional adalah sebagai berikut :

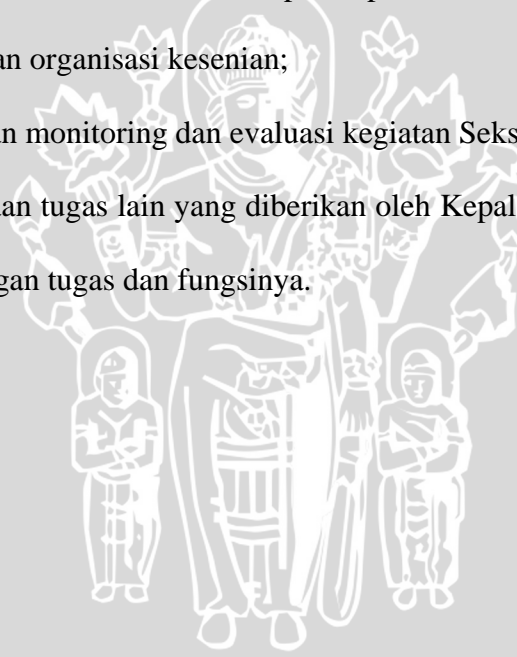
1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pendataan dan pemetaan data informasi potensi
3. pengembangan nilai-nilai tradisional daerah;

4. pelaksanaan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan;
5. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis terhadap lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, membina, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pembinaan dan perlindungan nilai-nilai kesenian dan perfilman di daerah. Adapun fungsi dari seksi kesenian dan perfilman adalah :

1. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2. pendataan dan pemetaan data informasi potensi pengembangan kesenian dan perfilman;
3. pelaksanaan fasilitasi kegiatan festival kesenian, pameran dan lomba di bidang kesenian;
4. pengelolaan administrasi ijin usaha pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan;
5. pengawasan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video;

6. pengelolaan administrasi ijin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian dan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri;
7. pengelolaan aset/benda kesenian;
8. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
9. pelaksanaan fasilitasi perumusan kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kesenian;
10. pengelolaan teknis administrasi penetapan Nomor Induk Kesenian bagi seniman dan organisasi kesenian;
11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.





DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
KOTA BATU

KEPALA DINAS

**KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL**

SEKRETARIAT

**SUB BAGIAN
PROGRAM &
PELAPORAN**

**SUB BAGIAN
KEUANGAN**

**BIDANG PENGEMBANGAN
PRODUK PARIWISATA**

**BIDANG PROMOSI &
PEMASARAN WISATA**

**BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PARIWISATA**

BIDA

**SEKSI OBYEK &
DAYA TARIK
PARIWISATA**

**SEKSI INFORMASI
& ANALISA PASAR**

**SEKSI BIMBINGAN
DAN PELATIHAN**

SEKSI

**SEKSI USAHA JASA
& SARANA WISATA**

**SEKSI PROMOSI
DAN KERJASAMA**

**SEKSI PERAN SERTA
MASYARAKAT**

SE

S

Garis Komando : _____
Garis Koordinasi : _____

Gambar 3. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Sumber : Dispartabud Kota Batu 2015

3. Gambaran Umum Situs Penelitian Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu

a. Profil Desa Gunungsari

Desa Gunungsari merupakan salah satu Desa di Kecamatan Bumiaji yang terletak di lereng Gunung Banyak. Menurut cerita yang umum diantara masyarakat Desa Gunungsari, sejak tahun 1745 M dinamakan oleh leluhur mereka Desa Gunungsari karena daerah tersebut terletak di antara pegunungan dan memiliki tanah yang sangat subur. Desa Gunungsari adalah merupakan desa yang terkenal dengan pertanian sayur dan peternakan sapi perah. Tetapi sejak tahun 2005 hingga sekarang Desa Gunungsari terkenal dengan Desa penghasil bunga mawar potong yang dipasarkan ke berbagai daerah bahkan keluar pulau Jawa, misalnya ke Ujung Pandang, Medan, Bali dan daerah-daerah lainnya.

1. Luas Wilayah Desa Gunungsari Menurut Penggunaan

Desa Gunungsari memiliki luas wilayah 453.077 Ha dengan pembagian :

- a. Pemukiman umum dengan luas 65,433 Ha
- b. Pertanian sawah/ irigasi luas 127,496 Ha
- c. Ladang/ tegalan luas 134,385 Ha
- d. Hutan luas 3244 Ha
- e. Bangunan perkantoran luas 0,070 Ha
- f. Lapangan olahraga sepakbola 1.122 Ha sedangkan lapangan bola voli dan basket 0.060 Ha

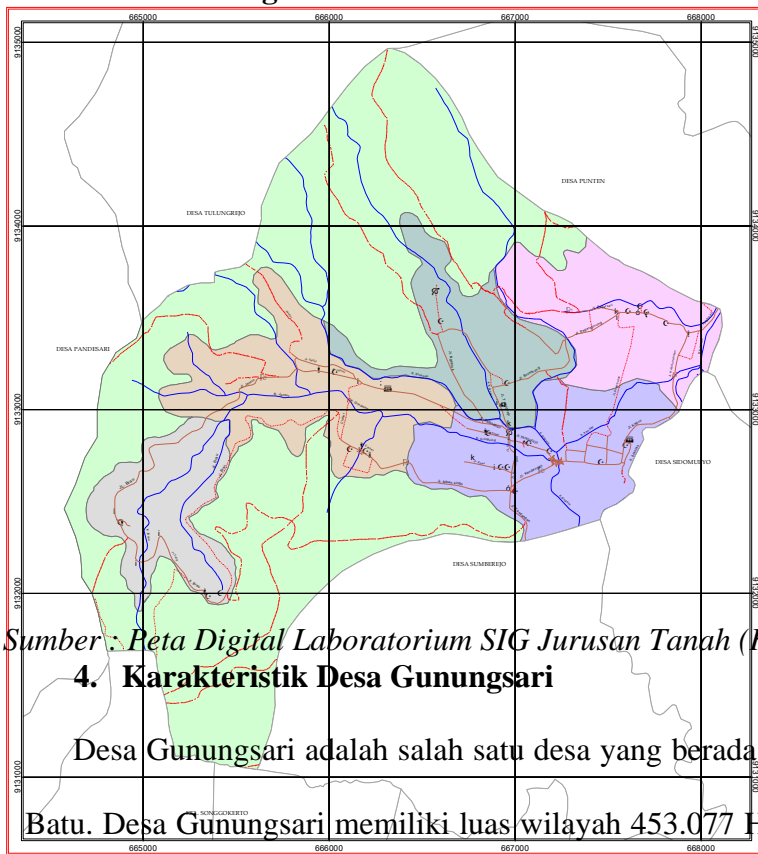
(Sumber : Pusat Informasi Pariwisata Kota Batu)

2. Batas-batas Wilayah Desa Gunungsari

- a. Batas Timur : Desa Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu
- b. Batas Barat : Desa Pandesari, Kec. Pujon, Kab. Malang
- c. Batas Selatan : Desa Sumberejo, Kec. Batu, Kota Batu
- d. Batas Utara : Desa Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu

Desa gunungsari berjarak 3 Km dari ibu kota Kecamatan Bumiaji dan 5 Km dari Kota Batu. Dan secara administrative terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Pagergunung, Dusun Kapru, Dusun Brumbung, Dusun Jantur, dan Dusun Brau.

3. Peta Desa Gunungsari



Gambar 4.
Peta Desa Gunungsari
Skala 1 : 7000

Sumber : Peta Digital Laboratorium SIG Jurusan Tanah (KKP Desa Gunungsari 2007)

4. Karakteristik Desa Gunungsari

Desa Gunungsari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Desa Gunungsari memiliki luas wilayah 453.077 Ha. Potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah Desa Gunungsari adalah lahan pertanian yang subur serta pemandangan alam yang indah. Potensi sumberdaya manusia di desa Gunungsari adalah berupa kerukunan antar warga masyarakat yang sangat erat dan sangat peduli akan pembangunan dan pengembangan, tetapi tetap menjaga tradisi dan lingkungan

desanya. Potensi keberadaan produk unggulan yang ada di desa Gunungsari adalah pertanian yang berupa sayur mayur dan bunga mawar potong. Khusus untuk bunga mawar potong, Gunungsari dikenal sebagai penghasil bunga mawar potong terbesar di Indonesia.

5. Data Dusun, RW dan RT Desa Gunungsari

Tabel 6. Jumlah Dusun, RW, dan RT Desa Gunungsari

NO	DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	Dusun Pagergunung	2	14
2	Dusun Kapru	3	24
3	Dusun Brumbung	2	10
4	Dusun Jantur	2	11
5	Dusun Brau	1	4

Sumber : diolah oleh peneliti, 2016

6. Data Penduduk

Tabel 7. Data Penduduk menurut Usia

NO	USIA	JUMLAH
1	0-<1 Tahun	111
2	1-5 Tahun	383
3	5-6 Tahun	183

4	7-15 Tahun	920
5	16-21 Tahun	522
6	22-59 Tahun	3.475
7	≤ 60 Tahun	778

Sumber : Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Gunungsari Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk Desa Gunungsari merupakan usia produktif (15-59 Tahun) dengan jumlah 4.917 orang.

Dan sisanya merupakan usia balita dan lansia.

7. Penduduk Desa Gunungsari berdasar Profesi

Tabel 8. Jumlah Penduduk Desa Gunungsari menurut Berbagai Tingkatan

NO	TINGKAT PENDUDUK	JUMLAH (Jiwa)
1	Jumlah Penduduk Desa Gunungsari	6.895
2	Jumlah Menurut jenis kelamin	
	Laki-laki	3.480
	Perempuan	3.415
3	Jumlah Menurut Kepala Keluarga	2.006 KK
4	Jumlah Menurut Mata Pencaharian	

Petani	679
Pelajar/Mahasiswa	797
Ibu Rumah Tangga	614
Pedagang	35
Transportasi	32
Karyawan	73
Pensiunan	16
Guru	16
Dosen	1
Industri	21
Polri	-
TNI	3
Konstruksi	-
Perikanan	1
Pembantu Rumah Tangga	17
Perawat	2
Peternak	49

	Sopir	31
	Tukang Batu	33
	Tukang Kayu	18
	Buruh tani	939
	Buruh Harian Lepas/ Karyawan swasta	1282
	Pegawai Negeri	17
	Belum Kerja	942
	Lainnya	658
	Jumlah Menurut Keadaan Cacat	
	Cacat Fisik	5
	Tuna rungu	3
5	Tuna Wicara	2
	Tuna Netra	3
	Lumpuh	2
	Cacat Mental	2
	Jumlah Menurut Tenaga Kerja	
6	Penduduk Usia Produktif (15-55 th)	4.212

Tidak Produktif	2.683
-----------------	-------

Sumber : Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Gunungnsari Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Desa Gunungnsari merupakan usia produktif dan rata-rata bekerja di sektor pertanian yakni 679 orang. Penduduk yang bekerja di sektor industri berjumlah lebih banyak daripada pekerja di sektor jasa atau perdagangan. Selain beberapa profesi tersebut, terdapat tingkatan pendidikan penduduk desa Gunungnsari, sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

8. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Gunungnsari

Tabel 9. Data tingkat pendidikan tiap penduduk Gunungnsari

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum tamat SD/ Sederajat	1.309
2	SD/Sederajat	3.516
3	SLTP	1.239
4	SLTA	501

5	D-1 / D-2	20
6	D-3	4
7	S-1	11
8	S-2	1
JUMLAH		6.895

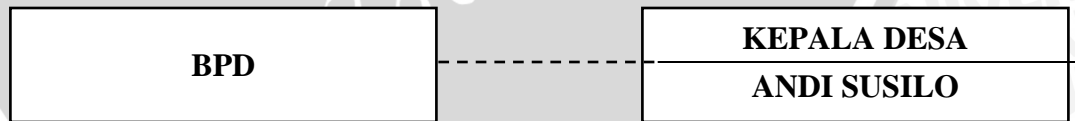
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Gunungsari Tahun 2015

Merujuk pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Gunungsari merupakan tamatan SD/Sederajat yakni dengan jumlah 3.516 orang, yang kemudian disusul dengan yang belum tamat SD/Sederajat yaitu dengan jumlah 1.309 orang, sisanya merupakan tamatan SLTP dengan jumlah 1.239 orang serta tamatan SLTA 501 orang. Untuk penduduk tamatan D-1 dan D-2 berjumlah 20 orang, D-3 4 orang, S-1 11 orang dan pendidikan tertinggi S-2 dengan jumlah 1 orang.

b. Struktur Organisasi Perangkat Desa

Pemerintahan Desa Gunungsari dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yaitu Bapak Andi Susilo. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan struktur organisasi perangkat Desa Gunungsari :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI



KAUR PEN
NUR

KAUR K
RITA

Gambar 5. Struktur Perangkat Desa Gunungsari

Sumber : Dokumen Struktur Organisasi Perangkat Desa Gunungsari 2015

Adapun visi dari Desa Gunungsari adalah membangun kejayaan Desa Gunungsari dengan menggali dan mengembangkan potensi sumberdaya dan kekayaan Desa berlandaskan budaya dan tradisi yang kokoh. Rumusan misi Desa Gunungsari dalam melaksanakan tatanan pemerintahan desa dan pelaksanaan program pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan secara menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan.
2. Menggali potensi dan kekayaan sumberdaya desa untuk dikembangkan guna menunjang proses pembangunan
3. Melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang baik fisik maupun sosial untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa gunungsari

4. Menggali, menjaga dan melestarikan budaya, adat istiadat dan kebiasaan yang ada di masyarakat sebagai pegangan dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai perisai dari pengaruh negatif kemajuan jaman.

c. Potensi Wisata

Berdasarkan dokumen profil Desa Gunungsari, Desa Gunungsari terbagi atas 5 Dusun yaitu, Dusun Pagergunung, Dusun Kapru, Dusun Brumbung, Dusun Jantur, Dusun Brau. Kelima dusun tersebut menyimpan potensi wisata yang beraneka ragam. Air Terjun Cendana

Di Dusun Jantur terdapat 2 buah air terjun yang masih alami, biasa disebut masyarakat setempat sebagai Coban Kembar. Coban Cendana memiliki luas sekitar ± 7.340 M².

Daerah Gunungsari memiliki banyak keindahan alam dengan pemandangan yang menakjubkan. Salah satunya adalah pemandangan alam di Dusun Brau. Paralayang, wisata ini terbangun pada tahun 2.000 yaitu untuk persiapan PON Jatim. Letak wisata ini sangat strategis dan mudah dijangkau dengan pesona alam dan pemandangannya yang indah menjadikan Paralayang menjadi salah satu tujuan wisata Batu. Tempat wisata ini sering mengadakan event Nasional juga Internasional dan menjadi Area Paralayang terbaik di Indonesia.

Goa Perlindungan, goa ini adalah salah satu peninggalan sejarah yang telah dibuat oleh Gerilyawan Indonesia pada masa penjajahan Jepang sebagai tempat perlindungan dan markas pejuang. Goa ini berukuran 3x1 – 1-2 M dengan kedalaman 10 M terletak di tebing dan Kecamatan Pujon. Mengingat peta wilayah Desa Gunungsari sebagian besar dikelilingi pegunungan maka daerah ini sangat cocok untuk kegiatan olahraga semacam motor trail.

Start/finish :

Dusun Kandangan > Dusun Claket > Dusun Brau > Dusun Jantur > Sarirejo > Dusun Kandangan > Dusun Kapru > Dusun Pagergunung > Dusun Sarirejo > Dusun Kapru.

Dengan adanya wisata petualangan ekstrim ini maka pengunjung dapat menikmati panorama keindahan alam Desa Gunungsari yang sesungguhnya.

Kemudian di bagian agro terdapat Sayur Mayur, berbagai jenis sayuran yang ada di wilayah desa Gunungsari diantaranya, Slada air, Daun Sledri, Daun Bawang Merah (Prei), Brokoli, Jagung Manis. Selain itu juga terdapat agrowisata Mawar Potong. Desa Gunungsari khususnya Dusun Brumbung dikenal sebagai penghasil bunga mawar potong terbesar di Indonesia. Di daerah ini bias dijumpai kawasan perbukitan penanaman bunga mawar potong. Berbagai macam jenis warna bunga mawar yang ada. Namun untuk spesifikasi yang ada ialah mawar merah.

Sedangkan di bidang peternakan, terdapat Sapi Perah. Dengan mayoritas masyarakat Dusun Brau yang rata-rata peternak dan di kelola semenjak tahun 1975, budidaya sapi perah ini dilakukan masyarakat Brau sebagai penunjang ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuai audit *Nestle* pada tahun 2009 “ Populasi sapi perah di dusun Brau mencapai 650 ekor dengan produksi susu mencapai 4500 liter / hari dan desa kami menjadi penghasil susu no. 1 terbesar di Kota Wisata Batu”.

Selain peternakan sapi perah, terdapat juga peternakan Kelinci. Kelebihan ternak kelinci dibanding ternak lainnya adalah Bersifat prolifrik (2-11 ekor per kelahiran, rata-rata 6 ekor), hamil / bunting dan menyusui pada waktu bersamaan, pertumbuhan cepat \pm 40 hari, pakan tidak tergantung pada bahan baku impor dan mampu konsumsi hijauan (rumput) serta produk limbah secara efisien dan tidak bersaing dengan pangan, dapat memanfaatkan limbah pertanian dan industri pangan, mudah beradaptasi dengan lingkungan dan mudah dibudayakan, menghasilkan daging sehat dan halal dikonsumsi, menghasilkan beragam produk seperti daging, kulit, bulu, pupuk organik dan hias, kualitas daging mengandung protein tinggi dan rendah kolesterol.

Pada bidang kesenian terdapat juga beberapa potensi wisata yang dimiliki Desa Gunungsari seperti, Terbang Jidor yang merupakan suatu pengembangan music islam, Pencak Silat merupakan seni bela diri, Bantengan yang merupakan kesenian tradisional, Wayang Kulit merupakan kesenian yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan sangat berharga, Karawitan yang merupakan kesenian yang menggunakan alat music gamelan biasa digunakan untuk mengiringi tarian dan nyanyian, dan terakhir adalah Kuda Lumping merupakan seni tari yang dimainkan dengan property kuda tiruan yang terbuat dari anyaman. Potensi Wisata lainnya adalah wisata religi, seperti Punden yaitu beberapa makam para tokoh-tokoh agama dan kerajaan serta pendiri daerah Gunungsari tersebut. Selain itu juga kerap diadakan acara Selamatan Desa untuk menarik para wisatawan. Selamatan desa di Desa Gunungsari diadakan setahun sekali pada hari Jumat Kliwon di bulan Mei dan dipusatkan di Pedukuhan Tiga Sahabat (Dukuh Kapru, Dukuh Kandangan dan Dukuh Sarirejo) tepatnya di Dusun Kapru.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat

a. Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata

Berdasarkan pendapat Iwan Nugroho (2011:17) mengenai pengembangan ekowisata, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah adanya pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata. Strategi pemasaran yang menempati posisi yang penting untuk menjangkau dan menarik wisatawan. Pemasaran destinasi biasanya

dilekatkan dengan strategi yang berorientasi pertumbuhan dan berfokus pada penciptaan citra, pengiklanan dan promosi penjualan yang bertujuan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun internasional (Dewi, 2011:8). Merujuk pada pendapat Phillip Koetler (2005:10), pemasaran adalah proses sosial yang dengan mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran destinasi dirancang agar dapat mempengaruhi wisatawan berkaitan dengan jenis produk dan aktivitas wisata yang dipilih, periode waktu kunjungan, jenis akomodasi, serta pola pengeluaran/ belanja selama berada di destinasi wisata.

Dalam pemasaran dikenal dengan istilah bauran pemasaran, yang menyangkut aspek- aspek di dalamnya, salah satunya adalah 4P, 4P merupakan singkatan dari *product* (produk), *price* (harga), *place* (distribusi), dan *promotion* (promosi). Aspek pertama yaitu *product*, berkaitan dengan produk yang dijual kepada pelanggan, dimana dalam hal ini produk berarti potensi wisata yang ada di desa wisata yang dijual kepada wisatawan. Dari aspek *product*, masyarakat berperan secara penuh dalam perencanaan dan pengelolaan potensi wisata yang akan dijual sebagai daya tarik wisata. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Syaiful Rohani, S.P selaku salah satu Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, bahwa :

“Pihak yang menentukan produk yang akan dijual adalah masyarakat desa itu sendiri. Karena pada dasarnya produk tersebut sudah ada sebelum dikenal dengan istilah desa wisata. Jadi sebagai contoh, kebun apel, budidaya jamur tiram, kebun sayur organik, dan lain sebagainya itu memang mayoritas masyarakat di Kota Batu bekerja di sektor pertanian. Jadi bukan pemerintah yang sengaja mendirikan dan sengaja membuat potensi wisata tersebut. Melainkan dari dulu memang

alamnya sudah seperti itu, hanya saja sejak dibentuknya desa wisata ini, potensi tersebut sudah lebih dikembangkan agar tidak hanya terlihat sebagai kebun biasa tapi layak disebut objek wisata dan dapat menarik perhatian wisatawan. Untuk pengelolannya, tentu saja masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah tinggal membantu mempromosikan dan memfasilitasi.” (Hasil wawancara pada 16 Mei 2016 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)

Penentuan dalam aspek *product* yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat

juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Aziz selaku anggota

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan tokoh masyarakat di Desa Gunungsari, bahwa

:

“Masyarakat desa yang menjadi satu-satunya pihak yang menentukan apa yang akan kami jual di Desa gunungsari ini. Kami yang telah mendiami desa ini sejak lama., ibaratnya kami penduduk asli jadi kami memahami apa saja yang dapat dijadikan potensi wisata disini. Lagipula memang potensi desa disini didominasi oleh alam, dan itu memang sudah ada sedari dulu karena mayoritas masyarakat kami bekerja di sektor tani. Hanya saja kalau dulu kami sekedar bertani, jadi kebun hanya sekedar untuk kebun yang memproduksi lalu dijual ke tengkulak. Tapi dengan adanya desa wisata ini terjadi peningkatan manfaat dari kebun-kebun yang ada disini yaitu dijadikan potensi wisata dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah hany amemberi bantuan fasilitas dan promosi terkait dengan produk wisata di sini. “ (Hasil wawancara pada 20 Mei 2016 di Desa Gunungsari).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa masyarakat menjadi aktor utama dalam penentuan produk yang dijual sebagai suatu potensi wisata di desa wisata yang bersangkutan. Dikarenakan objek wisata yang bersifat alamiah bukan buatan maka kebanyakan produk yang dijual memang sudah ada sebelum desa yang bersangkutan dicanangkan sebagai desa wisata. Hanya saja pada perkembangannya produk tersebut mengalami perkembangan untuk meningkatkan nilainya agar memiliki daya tarik bagi pelanggan yang dalam hal ini adalah wisatawan.

Aspek kedua *price* (harga). Sama halnya dengan aspek sebelumnya, *price* (harga) juga ditentukan sendiri oleh masyarakat desa wisata yang bersangkutan. Sehingga dapat

dikatakan bahwa masyarakat tersebut menjadi aktor tunggal dalam penentuan dan penetapan harga. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Mulyo Adji selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Pelatihan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Batu, bahwa :

“Pihak yang menentukan dan menetapkan harga dari berbagai paket wisata adalah masyarakat desa setempat. Yang mengelola objek wisatanya ya mereka sendiri sehingga dalam aspek hargapun mereka yang menentukan. Sebenarnya hal ini menimbulkan masalah juga, karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang patokan harga sesuatu paket wisata, sehingga terkadang terjadi perang tarif antar sesama desa wisata. Hal inilah yang menimbulkan persaingan tidak sehat.” (Hasil wawancara pada 6 Juni 2016 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

Pendapat yang disampaikan Bapak Mulyo Adji terkait masyarakat sebagai penentu harga paket wisata juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Aziz selaku anggota Pokdarwis dan tokoh masyarakat Desa Gunungsari, bahwa :

“Dalam penentuan harga setiap paket wisata ya masyarakat sendiri yang menentukan. Jadi itu bukan menjadi ranah pemerintah karna kepemilikan dan yang menjalankan objek wisata di desa ini adalah masyarakat kami sendiri. Cuma akhirnya kami susah juga karena belum ada peraturan yang mengatur tentang patokan harga. Jadi pernah terjadi perang harga. Hal itu membuat suasana antar pelaku desa wisata jadi tidak enak karena persaingannya tidak sehat.” (Hasil wawancara pada 20 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa masyarakat desa menjadi satu-satunya pihak yang menentukan dan menetapkan harga dari setiap paket wisata di desa wisata yang bersangkutan karena mereka sendiri yang memiliki dan mengelola berbagai objek wisata yang ada di desa wisata tersebut. Hanya saja pada perkembangannya terjadi permasalahan bahwa penetapan harga tersebut tidak di lengkapi dengan adanya regulasi dari pihak pemerintah, sehingga memungkinkan terjadinya perang harga sesama pelaku wisata di desa wisata yang pada akhirnya menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Aspek ketiga dalam pemasaran adalah *place* (distribusi) yang berkaitan dengan pemilihan tempat yang meliputi transportasi, perdagangan, pengaturan persediaan, dan cara pemesanan bagi konsumen. Untuk aspek ini, masyarakat desa tidak menjadi aktor tunggal, melainkan pemerintah turut ikut serta dalam mengatur aspek distribusi. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Syaiful Rochani selaku kepala seksi Objek dan Daya Tarik Wisata, bahwa :

“Dalam hal distribusi pihak pemerintah juga turut membantu dalam hal aksesibilitas, seperti memperbaiki jalan menuju desa wisata. Selain itu kami juga membantu dalam hal pemesanan bagi konsumen. Jadi di website kami mapupun di brosur, free map, kami sertakan kontak yang dapat dihubungi untuk info pemesanan.” (Hasil wawancara pada 20 Mei 2016 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

Pendapat yang sama mengenai aspek *place* dikemukakan oleh Bapak Aziz selaku anggota Pokdarwis dan tokoh masyarakat Desa Gunungsari bahwa :

“Kalau dalam aspek distribusi kami tidak bertindak sendirian, pemerintah juga membantu dalam hal distribusi. Contohnya masalah jalan yang berkaitan dengan akses. Yang memfasilitasi adalah pemerintah, seperti memperbaiki aspal. Selain itu pemerintah di brosur-brosurnya kan juga menyertakan kontak warga setempat yang dapat dihubungi apabila ada wisatawan yang ingin reservasi.” (Hasil wawancara pada 6 Juni 2016 di Desa Gunungsari).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam aspek *place* (distribusi), masyarakat tidak menjadi satu-satunya pihak yang berperan di dalamnya, melainkan terdapat peran pemerintah yang membantu memfasilitasi, seperti dalam hal aksesibilitas berkaitan dengan jalan menuju destinasi wisata, serta dengan menyertakan kontak masyarakat desa setempat yang dapat dihubungi apabila wisatawan ingin melakukan reservasi.

Berkaitan dengan aspek promosi dalam pemasaran yang spesifik menuju desa wisata, maka pihak yang melakukan aktivitas tersebut adalah pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu serta masyarakat lokal yang mendiami desa

wisata. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Haris effendi yang merupakan staf dari Bagian Pengembangan Produk Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, bahwa :

“Untuk masalah pemasaran desa wisata hal itu sudah menjadi salah satu tugas dari bagian promosi. Kami dari dinas Pariwisata membuat banyak brosur yang masing-masing menunjukkan potensi dari desa wisata. Brosurnya terlong lengkap mulai dari fasilitas dan akomodasi yang di akan di dapatkan oleh wisatawan. Jika ada event-event maka brosur itulah yang kami bagikan. Dari situlah banyak masyarakat yang tahu bahwa bukan hanya wisata buatan seperti jatim park saja yang ada di kota Batu. Masih banyak potensi desa wisata yang memiliki keunikan masing-masing. Selain itu info kepariwisataan juga kami cantumkan di websiter kantor kami di www.kotawisatabatu.com dan batukota.go.id . Kalau secara informal kami sering menyebarkannya melalui teman dan keluarga.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Mei 2016 di dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Mulyo Adji selaku kepala seksi

Bimbingan dan Pelatihan dari Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, bahwa :

“Selain promosi yang dilakukan oleh bidang promosi, saya beserta staf juga pernah melakukan promosi tentang desa wisata. Jadi kami mempertemukan ketua dan anggota asosiasi *travel agent* yang ada di Malang Raya maupun di Jawa Timur serta ketua pemandu wisata tingkat provinsi dan di tingkat Malang raya beserta kelompok sadar wisata. Diharapkan mereka yang menjadi motor untuk memasarkan desa wisata. Jadi terdapat kerjasama dengan biro perjalanan untuk memasarkan desa-desa wisata. Kami juga pernah mempertemukan pihak-pihak pelaku wisata dari Jogja dan Bali dengan yang ada di Batu. Kami duduk di satu meja untuk saling mempromosikan potensi daerah, yang salah satunya adalah desa wisata di Kota Batu ini.” (Hasil wawancara tanggal 20 Mei 2016 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

Aktivitas promosi desa wisata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tapi juga dilakukan oleh masyarakat yang mendiami desa wisata. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aziz selaku tokoh masyarakat dan anggota Pokdarwis Desa Gunungsari, bahwa :

“Masyarakat Gunungsari sebenarnya sudah sangat sadar dan semangat untuk mengembangkan desa wisata. Tanpa disuruh pemerintah, kami sudah jalan sendiri untuk memasarkan desa kami. Pemuda-pemuda melalui karang taruna membuat blog maupun website tentang Desa Gunungsari. Jadi dari website itu, banyak orang yang tahu tentang potensi apa saja yang ada di Desa Gunungsari. Banyak

orang yang mengira kalau di Gunungsari ini hanya petik mawar padahal wisata yang bias didapatkan disini lebih dari itu. Oleh karena itu website dan blog tersebut kami isi dan memperlihatkan semua potensi wisata yang ada disini. Ternyata memang banyak pengunjung yang datang kesini awalnya tertarik melihat potensi wisata yang kami tulis di website. Selain itu masyarakat disini juga aktif untuk menawarkan dan memasarkan tempat-tempat wisata yang ada. Intinya kami sebagai warga lokal aktif memasarkan dengan cara yang minim biaya.” (Hasil wawancara pada tanggal 6 Juni 2016 di Desa Gunungsari).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kedua belah pihak, yakni pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan masyarakat lokal yang dalam hal ini adalah masyarakat Gunungsari, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan promosi dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, hanya saja pemerintah melakukan lebih banyak jenis aktivitas promosi, mulai dari pembuatan brosur, *free map*, promosi melalui *website* resmi pemerintah, sampai pada mempertemukan aktor-aktor pariwisata . sedangkan dari masyarakat, *website* menjadi media yang ampuh untuk memasarkan desa wisatanya, hal tersebut sama-sama dilakukan masyarakat.

b. Keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif

Keterampilan dan layanan kepada pengunjung berkaitan dengan sikap yang dilakukan oleh masyarakat desa sebagai tuan rumah desa wisata. Masyarakat yang terlibat bersifat keseluruhan, itu artinya mulai dari pelaku usaha seperti pemilik kebun, pemilik ternak dalam semua bidang potensi wisatanya sampai pada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di desa wisata tersebut. Pada dasarnya mayoritas masyarakat Kota Batu, adalah petani sehingga mereka tidak memiliki *mindset* sebagai seorang pelaku usaha wisata. Oleh karena itu terkadang minim tentang melayani

wisatawan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu Astuti sebagai salah satu warga Desa Gunungsari, bahwa :

“Kami kan memang dasarnya banyak yang kerja di tani, kami tidak mempunyai dasar atau pengetahuan tentang pariwisata. Apalagi orang-orang disini rata-rata hanya lulusan SMP, jadi tidak punya kemampuan dan keterampilan untuk menjamu wisatawan. Tapi untungnya pemerintah member pelatihan ke pokdarwis (kelompok sadar wisata). Pelatihannya macam-macam, contohnya membuat karangan bunga mawar dan olahannya, mengelola dan menjamu wisatawan baik tata cara dan sopan santun agar tertib. Semua pengetahuan tersebut disebarkan ke masyarakat-masyarakat desa lainnya sehingga bertahap kami mengerti bagaimana cara mengelola desa wisata kami.” (Hasil wawancara pada 16 Juni 2016 di Desa Gunungsari).

Pelatihan memang menjadi salah satu kunci untuk membekali keterampilan desa wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara rutin dan berkala memberikan pelatihan terkait dengan mengelola desa wisata agar memiliki daya jual dan membekali masyarakat dengan prinsip-prinsip kepariwisataan demi memberikan kepuasan kepada para wisatawan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Mulyo Adji selaku kepala Seksi Bimbingan dan Pelatihan, bahwa :

“Salah satu program kami memang memberikan pembinaan dan pelatihan ke pelaku wisata, seperti Pokdarwis. Pelatihan itu diadakannya dua kali setahun, dan kami mendatangkan pembicara yang memang kompeten di bidangnya. Jadi kami datangkan orang dari provinsi yang memang memiliki keahlian dibidangnya sehingga masyarakat dapat mengembangkan berbagai aspek dan potensi yang ada di desanya. Yang kami berikan ini memang materinya luas, menyangkut berbagai aspek, dan menyeluruh ke semua pelaku wisata, bahkan di taraf yang terkecil. Selain pelatihan juga kami pernah melakukan studi banding ke Desa wisata di Jawa Tengah. Di sana desa wisatanya sudah maj, jauh kalau dibandingkan dengan Batu. Jadi kami ajak Pokdarwis untuk ikut studi banding jadi mereka bias lihat bagaimana orang-orang disana dalam mengembangkan desanya, bagaimana interaksi antar warga lokal dengan wisatawan. Sehingga saat mereka pulang mereka bias menceritakan pengalaman dan informasi tersebut kepada masyarakat di desanya.” (Hasil wawancara pada 16 Juni 2016 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

Kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata ternyata memang menjadi suatu alat yang efektif dalam meningkatkan keterampilan dan layanan

kepada pengunjung secara intensif. Hal itu sependapat dengan Bapak Aziz selaku warga dan anggota Pokdarwis dari desa Gunungsari, bahwa :

“Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas memang memberikan manfaat yang besar untuk pengembangan desa wisata di sini. Dari situ saya jadi tahu banyak hal tentang mengelola desa wisata dan melayani wisatawan. Dari situ informasi yang sudah saya dapatkan saya ceritakan lagi ke teman-teman, ke pemilik usaha, ke warga, dan ke pemuda mudi disini. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari segi potensi alamnya Desa kami lebih kaya dan berpotensi daripada desa wisata di Jawa Tengah. Saya cerita begitu ke teman-teman di desa jadi mereka lebih bersemangat agar Gunungsari ini menjadi desa wisata lebih baik.” (Hasil wawancara pada 21 Juni 2016 di Desa Gunungsari).

Berdasarkan dari keterangan-keterangan di atas yang didapat melalui wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui bagian pengembangan SDM sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat desa wisata melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin dan berkala yang diikuti oleh para pelaku pariwisata termasuk perwakilan desa wisata. Pelatihan dan pembinaan tersebut memberikan pengaruh yang baik terhadap keterampilan dan layanan kepada pengunjung. Studi banding juga menjadi salah satu media yang tepat untuk meningkatkan keterampilan penduduk lokal dalam mengelola desa wisatanya, karena dari studi banding tersebut mereka dapat membandingkan apa yang menjadi nilai plus dan apa yang kurang dari desa wisatanya, sehingga sepulangnya ke Kota Batu para perwakilan desa wisata yang mengikuti studi banding dapat melakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan desa wisatanya selama ini dan dapat menceritakan kepada warga yang lain untuk meningkatkan kualitas desa wisatanya terlebih dalam hal keterampilan melayani wisatawan.

c. Keterlibatan Penduduk Lokal

Merujuk pada dokumen Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata dan WWF Indonesia (2009:2), ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang

menitikberatkan peran aktif komunitas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat setempatlah yang memiliki pengetahuan tentang alam dan budaya yang menjadi potensi dan nilai jual daerahnya sebagai daya tarik wisata. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat menjadi hal yang mutlak. Pola kegiatan ekowisata berbasis masyarakat yang dalam penelitian ini adalah desa wisata, mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki baik secara adat maupun sebagai pihak pengelola.

Dilaksanakannya pengembangan desa wisata di Kota Batu juga tidak lepas dari masyarakat setempat, bahwa mereka memiliki peran yang aktif dalam pengelolaan desa wisatanya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Rendra selaku staff dari Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, bahwa :

“Dalam pengembangan desa wisata, dapat dikatakan kalau pemerintah bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi dan membantu, ya seperti dalam hal sarana dan pengembangan SDM. Jadi untuk menemukan dan mengelola potensi wisatanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di desa wisata itu sendiri. Masyarakat berperan sangat aktif dalam mengembangkan desa wisatanya. Salah satunya memasarkan desa wisata mereka dengan membuat blog dan website sebagai sarana untuk memasarkan pariwisatanya. Selain itu pemerintah juga membentuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Anggota Pokdarwis ini berasal dari masyarakat masing-masing desa wisata itu sendiri. Ibaratnya Pokdarwis ini menjadi kelompok yang mewakili masyarakat desa wisata. Kalau ada acara atau pelatihan ya kami mengundang Pokdarwis itu. Diharapkan dengan bekal yang diberikan pemerintah, Pokdarwis ini bisa menyebarkan informasi dan wawasannya ke masyarakat di desanya. Pokdarwis ini menjadi salah satu pihak yang sangat berperan dalam mengembangkan desa wisata.” (Hasil wawancara pada 21 Juni 2016 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

Keterlibatan masyarakat secara penuh dalam mengelola dan mengembangkan

desa wisata juga diakui oleh Bapak Aziz selaku anggota Pokdarwis sekaligus tokoh masyarakat Desa Gunungsari, bahwa :

“Masyarakat desa disini sebenarnya sudah sadar wisata. Sejak Kota Batu menggalakan diri sebagai Kota Wisata mulai tahun 2007, warga Gunungsari terutama para pemuda memiliki inisiatif untuk mengangkat desa kami jadi desa

wisata. Kami mencari cara bagaimana agar potensi yang ada di Desa Gunungsari dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Warga juga mempunyai inisiatif menggali potensi yang ada di Gunungsari ini. Selain itu kami membangun kerjasama antar warga desa yang memiliki usaha. Dari situ kami sering ngobrol-ngobrol membicarakan tentang bagaimana untuk mengembangkan agar Gunungsari ini semakin baik dan diminati oleh wisatawan, jadi kita sharing dengan karang taruna juga, kalau ada salah satu pihak dari desa kami yang punya hambatan kami cari solusinya sama-sama . kami juga saling mempromosikan usaha. Intinya bagaimana cara kami merangkul masyarakat Gunungsari utnuk sama-sama mensukseskan menjadi desa wisata yang bagus dan unggul dan agar semua potensi wisata yang ada dapat dimanfaatkan dan mendapat perhatian dari wisatawan. Selain itu juga perwakilan Pokdarwis dari desa-desa saling membicarakan agar menetapkan tarif tetap wisata, hanya saja hal tersebut belum tercapai hingga saat ini, kami masih mengusahakannya sampai sekarang.” (Hasil wawancara pada 21 Juni 2016 di Desa Gunungsari).

Keterlibatan secara aktif dari masyarakat dalam pengembangan desa wisata ternyata juga diakui oleh Bapak Luqman selaku Kepala Bagian Kesra di Kantor Kecamatan Bumiaji, bahwa :

“Keterlibatan masyarakat di desa wisata ini menyangkut aspek yang luas. Jadi walaupun ada pihak lain yang juga memiliki peran dalam pengembangan desa wisata, masyarakat tetap kita posisikan sebagai pihak yang juga memiliki peran dalam pengembangan desa wisata, masyarakat tetap kita posisikan sebagai pihak yang sangat penting. Pembangunan fasilitas yang dibangun pemerintah juga mendapat pengawasan dari warga setempat.” (Hasil wawancara pada 27 Juni 2016 di Kanor Kecamatan Bumiaji).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan desa wisata, masyarakat desa setempat memiliki peran yang sentral. Dalam hal ini, pemerintah hanya memberikan fasilitas berupa sarana prasarana beserta bimbingan dan pelatihan secara rutin dan berkala. Untuk pengelolaan potensi desa wisata dikembalikan lagi ke masyarakat desa setempat karena mereka yang sangat paham tentang kondisi dan situasi desa wisatanya. Jadi pihak yang menggli dan mengelola potensi wisata di desanya adalah masyarakat desa itu sendiri. Selain dalam aspek pengelolaan, keterlibatan masyarakat juga dapat dilihat dari aspek promosi dimana mereka menjalin kerjasama dengan banyak pihak, baik secara internal maupun eksternal.

Dari segi internal, masyarakat membangun kerjasama antar pengusaha petik mawar, peternakan dan kegiatan alam bebas lainnya beserta Pokdarwis, dan juga dengan kelompok masyarakat yang ada seperti karang taruna. Sedangkan dari segi eksternal, masyarakat terutama yang ada dalam gabungan Pokdarwis melakukan kerjasama antar desa wisata untuk mempromosikan masing-masing desanya.

Selain itu, adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, juga menimbulkan sisi positif dalam hal penambahan nilai. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Aziz selaku anggota Pokdarwis sekaligus tokoh masyarakat bahwa :

“Tentu saja dengan adanya keterlibatan penuh dari masyarakat dalam pengembangan desa wisata, hal tersebut menimbulkan perkembangan yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebelum yang saya katakan sebelumnya bahwa sebelum dicanangkannya desa wisata banyak sekali masyarakat desa yang pengangguran. Tetapi dengan adanya desa wisata dan keterlibatan penuh dari masyarakat kesejahteraan warga juga meningkat. Khususnya bagi petani mawar sebelumnya hasil dari mawar ini tidak termasuk banyak. Harga mawar juga dipermainkan oleh tengkulak. Tapi dengan adanya desa wisata maka mawar tersebut langsung dipasarkan kepada para wisatawan, selain itu juga harganya meningkat karena dikemas sebagai suatu produk wisata. Sehingga dari hal tersebut kesejahteraan petani mawar semakin terangkat.” (Hasil wawancara pada 27 Juni 2016 di Desa Gunungsari).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa keterlibatan penuh dari masyarakat di desa wisata menimbulkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya bagi pihak petani karena mereka dapat menjual langsung produknya kepada para wisatawan tanpa melalui pihak lagi, sehingga harga yang dipatok pun lebih tinggi dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Selain itu, dengan adanya keterlibatan penuh dari masyarakat dalam pengembangan, masyarakat setempat yang sebelumnya banyak tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan karena direkrut oleh pemilik pemilik usaha di desa wisata yang bersangkutan.

d. Kebijakan Pemerintah

Pengembangan desa wisata tentu saja tidak terlepas dari adanya intervensi pemerintah, yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pengembangan desa wisata. Merujuk pada pendapat James E Anderson yang dikutip oleh Islamy (2009:17), kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Nugroho (2012:167) berpendapat bahwa kebijakan public adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah, dan pemerintah disini adalah Negara.

Selain dalam hal pengembangan sarana prasarana serta pengembangan Sumber Daya Manusia, salah satu kebijakan pemerintah dalam mengembangkan desa wisata adalah dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata yang sering disebut Pokdarwis. Hal tersebut sejalan dengan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Syaiful Rochani selaku Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata bahwa :

“Jadi di sini untuk mengembangkan desa wisata itu ada dua hal yang jadi perhatian, yang pertama masalah sarana prasarana pariwisata dan infrastruktur yang menjadi salah satu tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia. Di bidang saya, kami mengembangkan desa wisata dengan membangun sarana untuk menunjang untuk menunjang kegiatan wisata. Contohnya kita bangun gapura atau pintu masuk menuju desa wisata, gazebo, membangun paving jalan, dan *rest area*. Malah di salah satu desa kami ada membangun fasilitas *outbound*. Jadi ya dalam membangun sarana prasarana di desa wisata kami sesuaikan dengan wilayah dan potensi yang ada di desa wisata yang bersangkutan. Untuk tindakan Dinas Pariwisata dalam hal pengembangan SDM ya dengan melakukan pembinaan dan pelatihan, sosialisasi, kami juga pernah melakukan studi banding untuk menambah wawasan dari pelaku wisata di desa-desa wisata yang ada di Kota Batu.” (Hasil wawancara pada 27 Juni 2016 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

Informasi terkait dengan pengembangan sarana prasarana desa wisata juga peneliti dapatkan dari wawancara dengan Bapak Aziz selaku anggota Pokdarwis dan warga Desa Gunungsari, bahwa :

“Kalau di Desa Gunungsari ini bantuan sarana yang kami dapatkan dari dinas ya gapura itu dan *rest area*. Adapun bantuan pipa untuk pengairan tetapi dari binamarga. Ya kalau sementara ini hanya itu saja yang dibangun Dinas sebagai sarana sebagai desa wisata Gunungsari ini.” (Hasil wawancara pada 27 Juni 2016 di Desa Gunungsari).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, baik dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, dan dengan masyarakat Desa Gunungsari dapat dikatakan bahwa pembangunan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah tidak sama antar satu desa dengan yang lainnya. Hal tersebut juga didasarkan atas kondisi dan kebutuhan dari desa wisata yang bersangkutan.

Peran Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata ini sejalan dengan pendapat Bapak Suroso selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat, bahwa :

“Pemerintah membentuk Pokdarwis ini diharapkan ada perwakilan-perwakilan dari desa wisata yang dapat menjadi penggerak bagi pengembangan desa wisatanya. Jadi kami menetapkan orang-orang yang dianggap pantas mewakili desa wisata untuk tergabung dalam kepengurusan Pokdarwis. Mereka juga dapat menjadi mediator antara kami dengan masyarakat, karena mereka merupakan penduduk asli yang mendiami desa wisata sehingga mereka sendiri yang mengetahui kebutuhan dan problematika apa yang dihadapi di desanya, karena mereka dibentuk oleh Dinas, maka keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat dapat mereka sampaikan kepada kami.” (Hasil wawancara pada 16 Juni 2016 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

Keberadaan dan peran Pokdarwis ini juga diakui oleh masyarakat yang mendiami wisata, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti selaku warga Desa Gunungsari, bahwa :

“Tentu saja Pokdarwis berperan aktif dalam pengembangan desa wisata disini. Di desa ini ada Pak Aziz beliau sering ikut pelatihan yang diadakan pemerintah, jadi pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan itu sering di bagi ke masyarakat desa inii melalui pertemuan-pertemuan warga atau sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Beliau ini kalau bagi saya menjadi salah satu penggerak dan aktif dalam menghimpun anak-anak muda disini untuk mengembangkan desa.” (Hasil wawancara pada 6 Juni 2016 di Desa Gunungsari).

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan desa wisata salah satunya adalah dengan cara membentuk Pokdarwis dimana hal tersebut telah ditetapkan dengan suatu regulasi, yang salah satunya adalah Peraturan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Hanya saja pada realitanya, harapan bahwa Pokdarwis ini mampu menjadi salah satu penggerak bagi pengembangan desa wisata, tidak selalu berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengembangan desa wisata adalah berupa pembuatan visi misi serta RPJMD yang mencantumkan strategi dalam mengembangkan desa wisata, pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baik dari segi sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia, serta keputusan pemerintah untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata demi menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di desa wisatanya masing-masing.

e. Pengembangan Kemampuan Penduduk Lokal

Penduduk lokal beserta lingkungannya merupakan kesatuan yang utuh dari wilayah desa wisata, yang dalam hal ini mengacu pada konsep ekowisata berbasis masyarakat. Masyarakat desa yang bersangkutan perlu dikembangkan potensi dan partisipasinya untuk memperoleh manfaat atas diselenggarakannya desa wisata. Berkaitan dengan pengembangan kemampuan penduduk lokal, hal ini telah menjadi salah satu tanggung jawab dari dinas Pariwisata dan Kebudayaan bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi tugas langsung dari Seksi Bimbingan dan Pelatihan.

Berbeda dengan pelatihan, pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lebih bertujuan untuk member dan meningkatkan kualitas keterampilan dari masyarakat desa wisata, tetapi bimbingan dan binaan yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Bapak ulyo Adji selaku Kepala Seksi Bagian Bimbingan dan Pelatihan, bahwa :

“Selain melakukan pelatihan secara rutin dan berkala, salah satu tugas kami adalah memberikan bimbingan dan binaan yang juga dilakukan secara rutin dan berkala. Salah satu contohnya pada awal 2011 kami menyelenggarakan acara yang mempertemukan para pelaku desa wisata termasuk perwakilan masing-masing desa dan Pokdarwis untuk memberikan wawasan kepariwisataan. Karena pada dasarnya kami sadar bahwa mayoritas masyarakat yang mendiami desa wisata ini adalah orang-orang pertanian yang tentu saja mindsetnya adalah mindset petani, bukan mindset seorang pelaku wisata. Dan kami berupaya untuk membekali mereka dengan dasar-dasar pariwisata dan banyak hal lagi yang berkenaan dengan cara-cara untuk mengembangkan desa wisata. Diharapkan dari bimbingan yang diberikan mulai terbentuk mindset sebagai pelaku wisata dan diiringi dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola daerahnya sebagai desa wisata.” (Hasil wawancara pada 16 Juni 2016 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

Adanya upaya dari pemerintah untuk mengembangkan kemampuan penduduk desa wisata melalui bimbingan dan pembinaan juga diakui oleh Bapak Aziz selaku anggota Pokdarwis dan tokoh masyarakat Gunungsari, bahwa :

“Bimbingan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah tentu saja memiliki pengaruh positif dalam hal kemampuan penduduk di desa wisata. Kan seperti yang sudah saya bilang bahwa mayoritas masyarakat di sini ya mindsetnya petani, kami juga bukan orang-orang dengan pendidikan yang tinggi yang memiliki wawasan luas tentang kepariwisataan. Apa yang diselenggarakan oleh dinas kan tidak Cuma pelatihan demi meningkatkan keterampilan tetapi juga ada bimbingan. Seperti yang pernah saya ikuti yaitu tentang kepariwisataan. Ya dari situ saya saya semakin paham tentang dasar-dasar pariwisata.” (Hasil wawancara pada 27 Juni 2016 di Desa Gunungsari).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan kemampuan penduduk lokal demi mengembangkan desa wisata diwujudkan melalui bimbingan dan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara rutin dan berkala. Bimbingan dan pembinaan tersebut dilakukan

dengan tujuan memberikan wawasan-wawasan dasar kepada penduduk lokal yang mendiami desa wisata, dimana penduduk lokal tersebut masih memiliki mindset sebagai petani bukan seorang pelaku wisata. Sehingga melalui bimbingan dan pembinaan tersebut masyarakat secara bertahap mulai paham mengenai kepariwisataan, khususnya dalam upaya mengembangkan desa wisatanya.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata

a. Faktor Pendukung

Dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat, tentu banyak hal yang menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung ini dapat berasal baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang mendiami desa wisata. Berdasarkan data- data wawancara dan data-data pendukung, maka dapat dikatakan bahwa terdapat faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata, yaitu :

1. Adanya komitmen yang kuat, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan desa wisata

Merujuk pada visinya, Kota Batu berupaya untuk mengembangkan daerahnya menjadi Kota Pariwisata yang tidak hanya dapat bersaing di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Salah satu objek wisata yang mendapat perhatian dari Kota Batu adalah

desa wisata, yang itu artinya pengembangan desa wisata menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan desa wisata, yang hal itu tertera dalam RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017. Komitmen yang kuat juga dari pemerintah ditunjukkan melalui upaya yang dilakukan melalui Dinas Pariwisata untuk mengembangkan desa wisata. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Syaiful Rochani selaku Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata, bahwa :

“Demi menjadi kota pariwisata yang tidak hanya dikenal secara nasional, tetapi juga internasional, tentu saja pemerintah tetap berusaha untuk mengembangkan seluruh potensi wisata yang ada, salah satunya desa wisata. Desa wisata ini menjadi suatu alternative wisata yang memiliki keunikan tersendiri. Kan selama ini orang melihat Batu identik dengan Jatim Park, BNS, padahal banyak desa wisata yang patut untuk dikunjungi. Terlebih lagi desa wisata merupakan suatu destinasi wisata yang masih sangat alami dan dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu pemerintah memiliki komitmen yang kuat bagaimana caranya untuk memajukan desa wisata. Kepala Dinaspun juga sangat semangat untuk memajukan desa wisata. Beliau selalu mengingatkan agar kami terus memaksimalkan segala upaya baik dari segi infrastruktur dan SDM agar desa wisata dapat menjadi lebih baik dan semakin dikenal wisatawan.” (Hasil wawancara pada 6 Juni 2016 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).
Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengembangkan desa wisata

juga sejalan yang dikatakan oleh Bapak Mulyo Adji selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Pelatihan, bahwa :

“Kami berupaya semampu kami untuk membantu masyarakat desa wisata untuk mengembangkan daerahnya. Salah satu contohnya saya pernah memberikan kontak para *travel agent* kepada Pokdarwis. Karena pada dasarnya desa wisata kan juga bergantung pada masyarakat desanya, kami sebagai pemerintah hanya memberikan fasilitas. Dari situ wakil-wakil desa wisata itu menghubungi *travel agent* dan melakukan kerjasama agar dapat mempromosikan desa wisatanya. Intinya pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mereka agar desa wisatanya dapat berkembang dan menjadi lebih baik.” (Hasil wawancara pada 27 Juni 2016 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa komitmen dari pemerintah dalam mengembangkan desa wisata tidak hanya sekedar tertuang dalam

RPJMD tetapi juga terwujud dalam upaya yang dilakukan oleh segenap staf dari Dinas Pariwisata untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan desa wisatanya masing-masing. Pemerintah dalam hal ini tidak menjadi satu-satunya pihak yang berkomitmen untuk mengembangkan desa wisata, tetapi masyarakat yang mendiami daerah tersebut juga memiliki komitmen kuat baik dalam menggali potensi, mengelola, maupun mengembangkan.

2. Pemberitaan Media Massa

Kiprah kota Batu sebagai Kota dengan beragam potensi wisata ternyata sudah dikenal tidak hanya dalam skala regional tetapi juga secara nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya media massa yang menyorot potensi wisata di Kota Batu, salah satunya desa wisata. Ternyata pemberitaan tersebut menjadi promosi dengan pengaruh yang besar, karena dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia secara luas. Ketertarikan yang tinggi dari media massa tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Andi Susilo selaku Kepala Desa Gunungsari, bahwa :

“Kami sering kedatangan tamu dari media, baik yang sekitar Malang Raya, Provinsi bahkan media nasional, terutama dari TV. Kami senang sekali jika ada media yang meliput, kan hal itu bias menjadi ajang promosi juga untuk desa kami. Dari media itu akhirnya banyak sekali wisatawan yang datang, bahkan dari luar pulau. Mereka takjub sekali dengan desa wisata yang ada di Kota Batu ini. Mungkin di kotanya tidak ada desa wisata dengan potensi yang alamiah ini. Setelah saya Tanya dapat info desa ini darimana mereka menjawabnya dari siaran TV nasional. Terkadang tamu-tamu daerah dan kementerian pun sering berkunjung ke desa kami.” (Hasil wawancara pada 6 Juni 2016 di Kantor Desa Gunungsari).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemberitaan dari media, terutama media nasional memberikan pengaruh positif yang positif bagi pengembangan desa wisata. Dari pemberitaan terjadilah aktivitas promosi dengan lingkup yang luas, yakni nasional. Sehingga pemberitaan tersebut dapat menarik minat wisatawan yang bahkan berasal dari luar pulau. Dengan semakin banyaknya orang yang melihat

pemberitaan tersebut maka akan semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan ke desa wisata, oleh karena itu masyarakat semakin termotivasi untuk mengembangkan desa wisatanya.

b. Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya sarana prasarana di desa wisata

Dalam pariwisata, sarana prasarana menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Begitu juga terkait dengan desa wisata. Desa wisata merupakan suatu destinasi wisata yang awalnya adalah lingkungan asli tempat masyarakat tinggal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa desa wisata merupakan pemukiman yang tentu di dalamnya terdapat sarana prasarana wisata yang memadai. Sebenarnya masalah sarana prasarana telah menjadi tanggung jawab dari pemerintah melalui Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tetapi pada realitanya sarana prasarana yang dibangun masih tergolong minim. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Aziz selaku anggota Pokdarwis dan tokoh masyarakat Desa Gunungsari, bahwa :

“Salah satu hambatan dalam pengembangan desa wisata ini ya kurangnya sarana prasarana yang memadai. Pemerintah hanya baru membangun gapura, rest area dan rencana kedepan adalah lahan parkir untuk wisatawan. Akses ke desa kami masih tergolong susah. Diluar itu kami masih butuh sarana- sarana umum seperti toilet umum, jalan paving ataupun aspal yang baik menuju kebun kami.” (Hasil wawancara pada 27 Juni 2016 di Desa Gunungsari).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah masih tergolong minim hanya sebatas aksesibilitas. Sarana prasarana lainnya seperti toilet umum, pos informasi dan lahan parkir masih rencana. Ternyata pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan mendapat respon yang lamban sehingga sampai saat ini belum ada tindak lanjut secara maksimal.

2. Minimnya pemahaman perangkat desa mengenai desa wisata

Minimnya pemahaman perangkat desa mengenai desa wisata, salah satunya ditunjukkan melalui minimnya regulasi yang dibuat demi mengembangkan desa wisata. Regulasi semestinya menjadi hal yang sangat penting karena berkenaan dengan peraturan tentang yang patut dilakukan atau tidak. Dalam pengembangan desa wisata regulasi yang ada masih sebatas di tingkat Kota dan lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sebagai contoh adalah regulasi mengenai Pokdarwis yang masih ada di tingkat Dinas, sehingga pada saat peneliti mendatangi kantor desa tidak memahami peran Pokdarwis bagi masyarakat desanya. Hal ini seperti yang dikatakan Ibu Rini selaku kepala urusan Pemerintahan Kantor Desa Gunungsari, bahwa :

“Dari pemerintahan desa belum mengatur tentang Pokdarwis, jadi belum ada regulasinya. Bisa dibilang kalau kami masih belajar tentang seluk beluk perannya. Kami masih mempelajari hal itu, karena takutnya sesudah membuat regulasinya malah berbenturan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Harapan kami sebelum membuat regulasi itu ada rundingan dulu dengan DPD (Dewan Perwakilan Desa). Memang kalau secara regulasi dari pusat sampai kota sudah ada, tetapi bagaimanapun juga kan kami yang melaksanakan. Dan untuk membuat dan menetapkan regulasi itu kami masih ingin mengkaji lagi karena apabila kami langsung mengadopsi peraturan dari pusat dan daerah, malah tidak cocok dengan lingkungan sosial yang ada disini.” (Hasil wawancara pada 27 Juni 2016 di Kantor Desa Gunungsari).

Minimnya regulasi di tingkat desa mengenai pengembangan desa wisata juga diungkapkan oleh Bapak Aziz selaku tokoh masyarakat dan anggota Pokdarwis Desa Gunungsari, bahwa :

“Sebenarnya banyak hal yang perlu diatur dalam rangka mengembangkan desa wisata. Salah satunya adalah masalah keseragaman harga, terutama dalam wisata. Takutnya kalau tidak ada regulasi dari pihak desa bias terjadi perang harga sesama pengelola usaha petik mawar. Kan kalau terjadi perang harga situasi sesama masyarakat jadi tidak rukun. Kemudian mengenai pemahaman

pengembangan desa wisata beliau mengakui jika kepala desanya pun tidak terlalu memahami seluk beluk desa wisata. Akhirnya perannya pasif, malah yang lebih berperan adalah masyarakatnya sendiri. Saat saya mengadu dan mengajukan kegiatan kepala desa kurang responsif juga padahal itu semua demi mengembangkan desa wisata kami.” (Hasil wawancara pada 27 Juni 2016 di Desa Gunungsari).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman perangkat desa Gunungsari mengenai pengembangan desa wisata masih sangat minim. Hal tersebut terlihat dari minimnya regulasi desa wisata yang dibuat oleh perangkat desa, padahal regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk mengatur seluk beluk dalam pengembangan desa wisata. Selain itu peran Kepala Desa masih tergolong pasif dalam menggerakkan masyarakat untuk mengembangkan Desa Gunungsari ke arah yang lebih baik.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat (*community-based ecotourism*)

Ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*) merupakan suatu pariwisata yang lahir dari konsep ekowisata. Merujuk pada definisi dari *World Conservation Union* (WCU) dalam Nugroho (2011:15) mengemukakan bahwa ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal. Ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*) muncul sebagai konsep yang mengedepankan aspek sosial daei konsep ekowisata. Konsep ini merupakan bentuk dari ekowisata dimana masyarakat lokal memiliki pasrtisipasi dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata. Hal ini sejalan dengan pendapat Denman (2001:2), bahwa “*The term community*

based ecotourism take this social dimension a stage further. This is a form of ecotourism where the local community has substantial control over, and involvement in, its development and management, and a major proportion of the benefits remain within the community". (Konsep ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial selangkah lebih jauh. Hal ini merupakan bentuk dari ekowisata dimana masyarakat lokal memiliki kontrol secara substansial dan keterlibatan di dalamnya, baik di dalam pengembangan dan manajemen, serta memiliki proporsi yang besar dari keuntungannya).

Dalam penelitian ini desa wisata dianggap sebagai salah satu destinasi wisata yang menggunakan konsep ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*) karena desa wisata menjunjung keaslian dari lingkungan alamiah dan dikelola oleh masyarakat setempat yang mendiami desa tersebut. Dalam melakukan pengembangan, terdapat beberapa aspek, yaitu :

a. Pemasaran yang spesifik

Aspek pertama dalam pengembangan desa wisata adalah pemasaran. Menurut Santon dalam Basu Swasta dan Irawan (2003:5), pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dalam bidang pemasaran, dikenal istilah bauran pemasaran, yakni 4P *product, price, place, dan promotion*. Aspek pertama dalam pemasaran adalah *product*. *Product* berkaitan dengan barang yang dijual kepada *customer*, yang dalam hal ini adalah berbagai potensi yang ditawarkan oleh masyarakat desa wisata. Dalam aspek ini, masyarakat desa juga menjadi

aktor tunggal dalam penentuan dan pengelolaan aspek *product*. Pada dasarnya potensi yang ada di desa wisata sudah ada sebelum desa yang bersangkutan mencanangkan dirinya sebagai desa wisata. Itu artinya perkebunan maupun *home industry* yang telah ada sejak lama dan menjadi lapangan pekerjaan masyarakat setempat. Sehingga dapat dikatakan bahwa *product* yang dijual di desa wisata bukanlah program buatan dari pemerintah, melainkan memang telah menjadi lingkungan alamiah di desa wisata yang bersangkutan. Pengelolanya pun dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa wisata setempat.

Aspek kedua dari pemasaran adalah *price* yaitu berkaitan dengan besaran harga yang ditujukan untuk suatu paket wisata. Dalam hal ini masyarakat yang menjadi satu-satunya pihak yang menentukan dan mengatur harga paket-paket wisata di masing-masing desa wisata. Sayangnya belum ada regulasi yang mengatur mengenai kesetaraan harga di masing-masing desa wisata, sehingga terkadang terjadi perang harga sesama pemilik usaha di suatu desa wisata. Hal ini dapat menjadi masukan bagi perangkat desa atau pihak dari kecamatan untuk melakukan intervensi dengan membuat regulasi agar terjadi kesetaraan harga dan tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam desa wisata yang bersangkutan.

Aspek ketiga dalam bauran pemasaran adalah *place*. *Place* berkaitan dengan distribusi. Menurut Koetler (2008:48), distribusi meliputi aktivitas perubahan dalam membuat produknya tersedia di target pasar. Strategi pemilihan tempat meliputi transportasi, pergudangan, pengaturan persediaan, dan cara pemesanan bagi konsumen. Selain itu distribusi juga berkaitan dengan pemilihan lokasi, persediaan transportasi dan juga logistik. Dalam hal ini masyarakat menjadi pelaku utama dalam mengatur aspek

place karena mereka merupakan masyarakat yang telah lama mendiami desa wisata yang tentu saja sangat mengetahui permasalahan dan potensi yang ada di lokasi, hanya saja pemerintah juga turut berperan yakni dalam hal akses transportasi serta cara pemesanan bagi konsumen yang sering dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

Aspek keempat adalah *promotion*. *Promotion* berkaitan dengan pemasaran. Promosi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata “*Pro*” dan “*Movere*”. *Pro* berarti maju *movere* berarti bergerak. Jadi promosi maknanya adalah membuat sesuatu tampak terbuka dan hidup senantiasa (Effendy 1986). Promosi merupakan suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang sesuatu yang dijadikan bahan promosi agar khalayak merasa tertarik atau bertambah informasinya. Berdasarkan pendapat Koetler dan Keller (2009:512), bauran komunikasi pemasaran promosi terdiri atas 7 cara komunikasi, yaitu :

1. *Advertising*
2. *Sales promotion*
3. *Public relation and publicity*
4. *Direct marketing*
5. *Personal selling*
6. *Word of mouth marketing*
7. *Event and experiences*

Dalam pengembangan desa wisata, pemasaran yang digunakan salah satunya melalui pembuatan brosur yang langsung memperlihatkan potensi masing-masing desa wisata, *guide book*. Itu artinya salah satunya cara yang digunakan dalam pemasaran ini adalah *advertising*. Cara *advertising* ini dilakukan oleh pihak pemerintah melalui Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan. Selain itu, pemasaran juga dilakukan melalui *website*, baik dari *website* resmi pemerintah maupun blog yang dibuat oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Pemasaran melalui *website* tergolong dalam cara *direct marketing*. Tidak hanya dengan cara *advertising* dan *direct marketing*, pemasaran juga dilakukan pemerintah yang dapat melalui forum pertemuan atau pameran yang diadakan oleh pemerintah yang dapat diistilahkan dengan *public relation and publicity*. Cara lain yang digunakan adalah *word of mouth*, yakni mempromosikan dari mulut ke mulut, dimana dalam hal ini staf-staf di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupaya untuk memasarkan desa wisata baik di lingkungan pergaulan, keluarga, dan pemerintah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemasaran yang spesifik menuju desa wisata dilakukan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat.

Berdasarkan paparan mengenai 4 aspek dalam pemasaran tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat menduduki peran yang sentral, itu artinya telah terjadi suatu pemberdayaan masyarakat di dalam pemasaran desa wisata, dimana masyarakat yang berperan secara dominan dalam pemasaran, baik dari segi produk, harga, distribusi dan promosi, sedangkan pemerintah hanya membantu dan bertindak sebagai fasilitator. Sayangnya, dari keempat faktor tersebut pemerintah harus benar-benar melakukan intervensi terkait dengan aspek harga yang disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur tentang kesetaraan harga. Bagaimanapun juga pemerintah desa yang bersangkutan harus mulai mengatur patokan harga agar tidak terjadi perang harga antar sesama pelaku wisata, karena pada dasarnya desa wisata berpijak pada keterlibatan dan peran aktif masyarakat desa sehingga seharusnya tidak boleh terjadi persaingan yang tidak sehat sesama masyarakat desa yang dapat membuat situasi pengembangan desa

wisata menjadi tidak kondusif, karena salah satu tujuan dikembangkan ekowisata adalah untuk menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam pengembangan desa wisata ini juga masih memerlukan adanya regulasi dan pembagian tugas yang baik antara perangkat maupun perangkat desa agar informasi yang disampaikan sesuai dengan harapan mereka serta perlunya kerjasama antara media massa dengan desa terkait agar tetap ada terpublikasi secara berkelanjutan.

b. Keterampilan dan layanan secara intensif kepada pengunjung

Aspek kedua dalam pengembangan desa wisata adalah keterampilan dan layanan secara intensif kepada pengunjung. Masyarakat desa wisata sebagai tuan rumah dan penyelenggara wisata tertentu harus memiliki keterampilan yang memadai dalam hal pariwisata sehingga diharapkan dapat melayani wisatawan dengan baik. Pada dasarnya masyarakat di desa wisata bekerja di sektor pertanian sehingga tidak memiliki keterampilan dalam hal pariwisata. Oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu memberikan pelatihan kepada komponen desa wisata, yang didalam hal ini adalah Pokdarwis beserta perwakilan desa wisata yang merupakan bekal agar mereka memiliki keterampilan dalam menyuguhkan potensi wisata dan melayani wisatawan. Keterampilan- keterampilan yang diajarkan merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh pelaku wisata, seperti contohnya melatih masyarakat desa tentang cara mengelola desa wisatanya, memandu wisatawan, menerjemahkan objek

wisatanya dengan baik dan sebaiknya. Pelatihan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Pemateri yang didatangkan merupakan pakar dan praktisi di bidang perhotelan, sehingga dengan didatangkannya tenaga professional sebagai pemateri dapat dipastikan apabila hal-hal yang diajarkan merupakan materi yang berkualitas. Selain itu peran Pokdarwis dalam peningkatan keterampilan sangatlah penting karena bagaimanapun ia harus bertanggung jawab untuk melakukan transfer pengetahuan dan informasi yang telah di dapatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada masyarakat di desanya.

c. Keterlibatan Masyarakat

Sebagai konsep ekowisata berbasis masyarakat, pendekatan pengembangannya pasti melibatkan masyarakat dengan alasan bahwa sektor pariwisata menyediakan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, serta pariwisata dapat menciptakan berbagai keuntungan sosial maupun budaya, serta pariwisata dapat membantu mencapai sasaran konservasi lingkungan (Inskeep dalam Tanaya dan Rudianto 2014:73). Dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat, adanya keterlibatan penduduk lokal tentu menjadi pelaku wisata yang mengelola, mengembangkan, dan mendapatkan keuntungan financial dari penyelenggaraan desa wisata. Pada dasarnya masyarakat di desa Gunungsari memiliki peran besar terhadap pengelolaan desa wisatanya. Mereka saling membantu dan bekerjasama antar pelaku wisata serta mempromosikan desa wisatanya. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga dapat dikatakan menjadi penggerak pengembangan desa wisata melalui transfer pengetahuan dan informasi.

Adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, mengandung aspek pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada pendapat Priyono S onny dan Pranaka (1996:55), pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya, dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Teguh (2004:82-83), tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam suatu proses pemberdayaan antara lain :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan
3. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan, keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian

Berkaitan dengan pengembangan desa wisata, ketiga aspek tersebut telah dilakukan pemerintah demi memberdayakan masyarakat di masing-masing desa wisata, termasuk Gunungsari. Tahap pertama yakni penyadaran dan pembentukan perilaku dilakukan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tentang visi misi kota Batu yang salah satunya berupaya untuk menjadi kota pariwisata tingkat internasional. Dari situ masyarakat sudah mulai mengerti bahwa pariwisata menjadi sektor yang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Sehingga mulai timbul kesadaran untuk mengembangkan desanya tidak hanya dalam sektor pertanian, tetapi juga dalam sektor pariwisata. Sedangkan untuk tahap kedua yaitu transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, agar terbuka wawasan dan emberikan keterampilan dasar dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan cara memberikan pembinaan yang didalamnya memperkenalkan dasar-dasar

pariwisata dan cara-cara mengelola desa wisata. Dari situ mulai terdapat wawasan baru tentang kepariwisataan, khususnya desa wisatanya. Hal tersebut menjadi hal yang penting karena *mindset* masyarakat desa sebelumnya berbasis pertanian, sehingga pengenalan konsep pariwisata menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan untuk membuka wawasan masyarakat tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Sedangkan tahap ketiga adalah peningkatan intelektual, kecakapan, keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata juga mengadakan pelatihan secara berkala dengan ragam materi tentang pengembangan desa wisata, seperti cara mengelola desa dan produk unggulannya. Sehingga masyarakat yang sebelumnya mayoritas petani dapat memiliki keterampilan. Diharapkan melalui ketiga tahap tersebut masyarakat memiliki bekal yang cukup mandiri dalam mengembangkan desa wisatanya.

d. Kebijakan Pemerintah

Pengembangan desa wisata tentu tidak terlepas begitu saja dari peran pemerintah, melainkan menjadi salah satu perhatian dalam sektor pariwisata. Hal tersebut terbukti dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai pengembangan desa wisata. Merujuk pada jenis atau kategori kebijakan tersebut menurut James Anderson dalam Suharno (2010:24-25), dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah Kota Batu berkaitan dengan pengembangan desa wisata adalah kebijakan substansial, karena kebijakan pemerintah Kota Batu berkaitan dengan apa yang akan dilakukan pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kebijakan substansial ini berupa visi misi Kota Batu serta RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 yang memasukkan desa wisata sebagai salah satu perhatian yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Sayangnya hal tersebut dirasa

belum cukup untuk mengatur pengembangan desa lingkup kota, padahal juga diperlukan kebijakan yang bersifat regulatori dalam lingkup Desa atau Kelurahan terkait kesetaraan harga di desa wisata serta mengatur peranan Pokdarwis, karena bagaimanapun juga Desa dan Kelurahan yang bersangkutan yang menjalankan desa wisata secara langsung.

Solichin Abdul Wahab (2008:40) memberikan beberapa pedoman untuk memahami istilah kebijakan, yakni :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik mesti tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pengembangan desa wisata tertuang dalam visi misi kota Batu serta dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Berikut merupakan visi misi Kota Batu 2012 – 2017 :

Visi : Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional

Adapun misi-misi Kota Batu antara lain :

1. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah
3. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik
4. Meningkatkan posisi peran dari kota secara sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan internasional

5. Optimalisasi pemerintahan daerah
6. Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan
7. Peningkatan kualitas kesehatan
8. Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas
9. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat
10. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis
11. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM

Dari visi misi tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kota Batu memiliki perhatian khusus dalam hal pariwisata, yang tentu terdapat aspek desa wisata didalamnya. Demi menjalankan misi nomor 4 yakni meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan internasional, terdapat beberapa strategi terkait dengan pengembangan desa wisata, antara lain :

1. Mengembangkan desa/kelurahan menjadi desa-desa wisata berdasarkan potensi masing-masing wilayah
2. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan wisata internasional untuk “desa wisata”

Adapun dalam menjalankan misi nomor 8 yaitu pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas, salah satu sasarnya memiliki keterkaitan dengan pengembangan desa wisata yaitu terwujudnya infrastruktur pariwisata, yang salah satu strateginya berupa

pembangunan *rest area*. Berkaitan dengan pengembangan desa wisata pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pengembangan dalam dua hal, yaitu infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Selain dalam hal pengembangan sarana prasarana serta pengembangan Sumber Daya Manusia, salah satu kebijakan pemerintah dalam mengembangkan desa wisata adalah dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata yang sering disebut Pokdarwis yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu Nomor. 188/KEP/422.109/2010 Tentang Penunjukan Pengurus Pokdarwis tingkat Kota di Kota Wisata Batu Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu Rahun Anggaran 2010. Merujuk pada pendapat Rahim (2012:5) sadar wisata digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam 2 hal berikut, yaitu :

1. Masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (*host*) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif sebagaimana tertuang dalam slogan Sapta Pesona.
2. Masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan secara informal yang dibentuk dari anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan daerahnya) yang menjadi salah satu unsure pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan serta peran penting dalam pengembangan wisata di daerahnya, yang dalam hal ini adalah desa wisata. Pokdarwis dalam konteks pengembangan desa wisata berperan sebagai salah satu penggerak untuk mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif di desanya.

e. Pengembangan Kemampuan Penduduk Lokal

Adanya pengembangan kemampuan penduduk lokal menjadikan adanya suatu proses pengembangan kapasitas di lingkup masyarakat desa wisata setempat. Merujuk pada pendapat Riyadi (2006:15), dimensi pengembangan kapasitas terbagi ke dalam tingkatan, yaitu tingkat individu, tingkat organisasi, dan tingkat system. Pada tingkat individu, *capacity building* ditekankan pada aspek pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengelompokkan kerja. Sedangkan pada tingkat organisasi, berkaitan dengan sumber daya organisasi, budaya organisasi, ketatalaksanaan, struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan. Tingkatan terakhir adalah tingkatan pengembangan kapasitas pada sistem, dimana seluruh komponen pemerintah termasuk di dalamnya, seperti menyangkut peraturan, serta kebijakan. Apabila merujuk kepada aspek pengembangan kapasitas di desa wisata terjadi di tingkat individu, yaitu pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan kemampuan penduduk lokal demi mengembangkan desa wisata dilakukan dengan cara pemberian bimbingan bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memberikan wawasan secara rutin dan berkala. Bimbingan dan pembinaan tersebut secara bertahap mulai paham mengenai kepariwisataan dan bagaimana cara mengelola potensi-potensi yang ada di desanya.

Selama ini peserta dari kegiatan bimbingan dan pembinaan ini adalah Pokdarwis dan perwakilan desa wisata. Itu artinya hanya satu atau dua orang yang mewakili desa wisata untuk mendapatkan wawasan tersebut. Hal ini menjadi tidak efektif apabila wakil yang bersangkutan ternyata bukanlah orang yang diharapkan oleh pemerintah.

Mengetahui hal tersebut, maka regulasi mengenai tugas dan peran Pokdarwis tingkat kelurahan atau desa sangat dibutuhkan, karena bagaimanapun lingkup kelurahan atau desa yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengembangan desa wisata, sehingga apabila regulasi tersebut diberlakukan anggota Pokdarwis akan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perannya di desa wisatanya.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata

a. Faktor Pendukung

Dalam pengembangan desa wisata terdapat setidaknya 3 faktor pendukung, yakni adanya komitmen yang kuat baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan desa wisata, kondisi geografis dan pemberitaan dari media massa. Sebagai faktor pertama, terdapat keselarasan antara pemerintah dan masyarakat desa wisata untuk saling berkomitmen mengembangkan desa wisata. Dalam hal ini, pemerintah tidak menjadi actor tunggal yang berupaya untuk mengembangkan desa wisata, tetapi masyarakat desa pun telah memiliki kesadaran dan upaya untuk mengembangkan desa wisatanya. Sehingga pemerintah tidak perlu berupaya keras dalam memotivasi masyarakat. Komitmen yang tinggi dari masyarakat ditunjukkan melalui visi misi Kota Batu serta RPJMD yang memuat poin mengenai pengembangan desa wisata. Tidak hanya itu, staf dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga juga aktif dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada di desa wisata dengan melakukan pelatihan dan pembinaan secara berkala, serta sering mempertemukan pelaku wisata di luar desa wisata untuk melakukan kerjasama. Di lain pihak, komitmen yang tinggi dari

masyarakat terlihat dari inisiatifnya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak serta memasarkan desa wisatanya melalui *website* ataupun blog dan media sosial lainnya.

Faktor pendukung kedua dalam pengembangan desa wisata adalah kondisi geografis. Kondisi alam yang dimiliki masing-masing desa wisata mempunyai daya tarik tersendiri dimana potensi yang dimiliki desa wisata berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan kondisi alam yang masih alami itulah desa wisata menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan. Hal tersebut selaras dengan konsep ekowisata, bahwa kegiatan pariwisata yang di selenggarakan tidak perlu merubah landscape alam demi menjaga kelestarian alam dan menimbulkan dampak negative seminimal mungkin bagi lingkungan.

Faktor pendukung ketiga adalah pemberitaan media massa. Citra Kota Batu sebagai kota pariwisata sudah dikenal baik dalam skala regional maupun dalam lingkup nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya media massa yang meberitakan potensi wisata di Kota Batu, yang salah satunya adalah desa wisata. Pemberitaan tersebut dilakukan baik dari media cetak maupun televisive. Hal itu membawa dampak yang sangat positif karena melalui pemberitaan itulah terjadi promosi dengan cakupan masyarakat secara luas, sehingga menimbulkan ketertarikan bagi wisatawan yang berdomisili jauh dari Kota Batu.

b. Faktor Penghambat

Dibalik adanya faktor pendukung, tentu terdapat pula faktor-faktor yang menghambat pengembangan desa wisata. Faktor tersebut adalah masih kurangnya sarana prasarana di desa wisata, minimnya pemahaman perangkat desa mengenai desa wisata, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam manajemen potensi wisata. Faktor

penghambat pertama adalah masih kurangnya sarana prasarana di desa wisata. Merujuk pada pendapat Budiyanto (2010:38), pengembangan ekowisata salah satunya menyangkut peningkatan sarana dan prasarana penunjang di kawasan wisata. Tetapi pada realitasnya, fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah masih belum memadai bagi aktivitas wisatawan. Sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah masih belum memadai bagi aktivitas wisatawan. Sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah hanya sebatas aksesibilitas sedangkan untuk fasilitas umum penting seperti toilet umum, pos informasi, lahan parkir dan *rest area* masih belum dibangun. Pengaduan masyarakat belum mendapat tindak lanjut dari pemerintah terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga sampai saat ini untuk pemenuhan fasilitas masih belum terlaksana secara penuh. Hal tersebut menjadi kesalahan yang vital, karena pada dasarnya kegiatan pariwisata harusnya dapat menciptakan kenyamanan dan kepuasan wisatawan, yang salah satunya diperoleh melalui adanya fasilitas umum di destinasi wisata. Maka dari itu pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih intens terkait dengan fasilitas umum yang dibangun di desa wisata.

Faktor kedua adalah minimnya pemahaman perangkat desa mengenai desa wisata. Seharusnya perangkat desa memiliki wawasan tentang pengelolaan desa wisata agar ia mampu menggerakkan masyarakatnya dengan baik dalam upaya pengembangan desa wisata. Tetapi pada realitanya, perangkat desa tidak memiliki pemahaman yang memadai sehingga ia tidak punya peran aktif dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Akhirnya hal tersebut berimbas pada belum adanya regulasi di tingkat desa yang mengatur aspek-aspek dalam pengembangan desa wisata, salah satunya adalah regulasi mengenai peranan Pokdarwis serta kesetaraan harga paket wisata. Hal tersebut

memperlihatkan bahwa perangkat desa belum mampu dalam menjalankan perannya untuk memimpin dan memberdayakan masyarakat di desanya. Berdasarkan pendapat Nurcholis (2011:154) bahwa diharapkan desa dapat berfungsi dalam kedudukannya sebagai sumber data dan informasi bagi segala kegiatan dan pembangunan. Apabila merujuk pada pendapat tersebut, maka seharusnya perangkat desa memiliki pemahaman yang tinggi mengenai desa wisata karena dalam hal ini desa berperan sebagai sumber data dan informasi bagi segala kegiatan dan pembangunan, yang di dalamnya termasuk pengembangan desa wisata.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pengembangan desa wisata sebagai perwujudan ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pengembangan desa wisata terdapat 5 aspek yaitu pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata, keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif, keterlibatan penduduk lokal, kebijakan pemerintah, serta pengembangan kemampuan penduduk lokal
2. Sebagai aspek pertama yaitu pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata, hal ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat lokal. Dari segi pemerintah, Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan membuat brosur yang masing-masing menunjukkan potensi desa wisata lengkap beserta paket wisata, harga dan akomodasi, beserta potensi wisatanya masing-masing serta *guide book* yang memuat informasi wisata beserta paket wisata, akomodasi dan *contact person* yang dapat dihubungi. Selain itu pemerintah juga melakukan promosi desa wisata melalui *website* resmi pemerintah secara aktif melakukan promosi desa wisata melalui event-event yang melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Sedangkan dari segi masyarakat, masyarakat desa wisata setempat melakukan promosi dengan membuat blog yang memperlihatkan potensi yang ada di desa wisata beserta paket wisatanya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Batu juga menyelenggarakan pelatihan secara rutin dan berkala untuk membekali masyarakat desa dengan keterampilan mengelola desa wisata dan melayani wisatawan. Aspek ketiga yakni kebijakan pemerintah dalam mengembangkan desa wisata tertuang dalam visi misi yang ingin mewujudkan Kota Batu sebagai kota pariwisata secara internasional, yang salah satunya dengan mengembangkan desa wisata sebagai salah satu potensi wisata unggulan di kota Batu. Kebijakan pemerintah juga terlihat dalam RPJMD Kota Batu yakni berusaha mengembangkan desa/ kelurahan menjadi desa wisata berdasarkan potensi masing-masing wilayah, menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan wisata internasional untuk “desa wisata”. Selain itu kebijakan pemerintah dilakukan dengan memberikan sarana prasarana fasilitas kepada masing-masing desa wisata dan bimbingan secara berkala dan rutin dan berkala kepada perwakilan desa wisata, serta dengan membuat SK tentang pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang dibentuk sebagai perwakilan desa wisata yang berupaya untuk memberdayakan masyarakat di desanya dan sebagai mediator antara masyarakat desa dengan pemerintah.

Aspek selanjutnya dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan penduduk lokal, dimana masyarakat desa setempat berperan aktif dalam aspek penentuan objek wisata, pengelolaan desa wisata. Aspek terakhir adalah kemampuan penduduk lokal. Peningkatan kemampuan penduduk lokal dilakukan dengan cara yang sama pelatihan dan bimbingan secara rutin dan berkala kepada Pokdarwis beserta perwakilan dari masyarakat desa wisata yang di fasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

3. Dalam pengembangan desa wisata terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata antara lain adanya komitmen yang kuat baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan desa wisata, kondisi geografis, dan pemberitaan dari media massa. Sedangkan faktor penghambat adalah masih kurangnya sarana-prasarana di desa wisata, minimnya pemahaman perangkat desa mengenai desa wisata, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam manajemen potensi wisata.

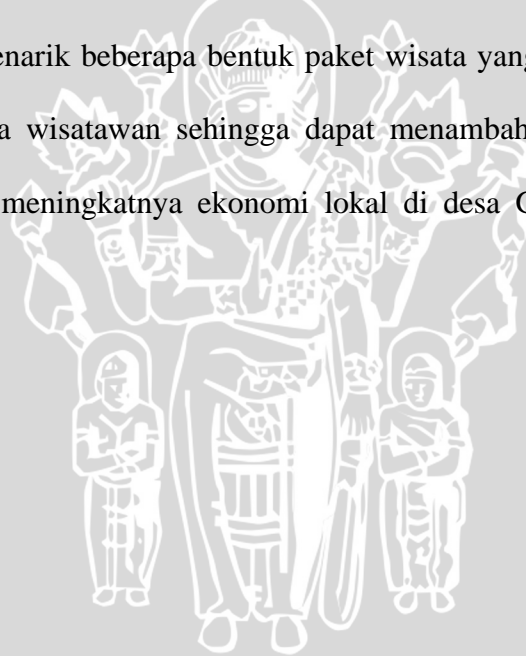
B. Saran

Dalam mengembangkan desa wisata sebagai perwujudan ekowisata berbasis masyarakat di Kota Batu masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Untuk itu perlu adanya solusi agar pengembangan desa wisata agar dapat memberikan keuntungan baik kepada Pemerintah Kota Batu maupun kepada masyarakat desa setempat. Berikut beberapa saran-saran yang diharapkan mampu membantu agar pengembangan desa wisata dapat berjalan ke arah yang lebih baik, diantaranya :

1. Pemerintah Kota Batu sebaiknya memberikan perhatian yang intens terkait dengan sarana prasarana untuk menunjang desa wisata. Sarana prasarana untuk menunjang desa wisata. Sarana prasarana tersebut harus dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan dasar dari

wisatawan, seperti lahan parkir yang memadai, pos informasi, *rest area*, jalan yang di paving atau aspal dengan baik, dan toilet umum.

2. Perangkat desa harus mau untuk membekali diri dengan wawasan mengenai desa wisata agar mampu berperan aktif untuk menggerakkan masyarakatnya dalam pengembangan desa wisata.
3. Disamping pemberian pelatihan dan pembinaan kepada Pokdarwis dan wakil dari desa wisata akan lebih baik apabila pihak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan sosialisasi secara intens tentang manajemen potensi wisata dan observasi ke desa wisata untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat.
4. Perlunya pengemasan menarik beberapa bentuk paket wisata yang berwawasan edukatif dan konservasi bagi para wisatawan sehingga dapat menambah wawasan masyarakat maupun wisatawan dan meningkatnya ekonomi lokal di desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu.





UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

- Basu Swastha, DH dan Irawan, 2003. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Budianto, Moch. AgungKrisno. Jurnal teknik Industri Vol II No. 1: *Teknik Pengembangan Industri Ekoturisme Kota Batu Provinsi Jawa Timur Dalam Perspektif Kebijakan*. Februari 2012.
- Damanik, Janianton. 2013. *Pariwisata Indonesia : antara peluang dan tantangan*,
- Damanik, Janianton., dan Webber, Helmut.F. 2006. *Perencanaan Ekowisata*
- Denman, 2001. *Community based Development Planning*. John Willey, and Sons, Inc.
- Elly, dkk, 2013, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Kencana Jakarta
- Ernawati, dkk, 2006, *Pengaruh Sosial Budaya Ekowisata Berbasis Masyarakat*
- Fandeli, Chafid., dan Nurdin, Muhammad. 2005. *Pengembangan Ekowisata*
- Hakim Luchman, 2004. “*Dasar-dasar Ekowisata*” . Malang:Bayu media

Haris Sutan Lubis, 2008. "Prinsip-prinsip Ekowisata"

<http://www.batukota.bps.go.id> diakses tanggal 8 juli 2016

Ismayanti, 2010. *Pengantar Pariwisata*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Koetler, dan Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran* Edisi 13

Kota Batu Dalam Angka 2015. Badan Pusat Statistik. 2015

Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Gunungngsari Tahun 2015

Miles, Huberman Saldana. 2015. *Qualitative Data Analysis: A methods Sourcebook Third Edition*. SAGE Publication Inc.

Moeleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Puskakarya.

Nugraheni, Endang. 2002. *Sistem Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Gunung Halimun)*. [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Nugroho, Iwan. 2011. "*Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di daerah

Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Sastrayuda, S. Gumelar. (2010) *Konsep Pengembangan Kawasan Ekowisata*. Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort And Leisure.

Setdyadharma, dkk. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan*

Sharpley, Richard, 2000. *Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Dvice*. Journal Of Sustainable Tourism

Soekarya T. 2011. *Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata*.

Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Tjahja Supriatna, 2000. *Pembangunan Desa*. Gramedia Pustaka

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta.

World Tourism Organization. 2000. WTO News Issue 2. Madrid.

www.kotawisatabatu.com diakses pada 8 Juli 2016

Yoeti, OA. 2008 *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung [ID]: Angkasa.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)

Nama :

Jabatan :

Pertanyaan

1. Bagaimana awal terbentuknya desa wisata di Kota Batu ?
2. Bagaimana pengelolaan desa wisata di Kota Batu ?
3. Bagaimana pengembangan desa ekowisata yang dilakukan oleh pemerintah?
4. Program-program apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan desa ekowisata?
5. Bagaimana keterkaitan masyarakat dalam upaya pengembangan desa ekowisata yang dilakukan oleh pemerintah ?

6. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan desa ekowisata dan partisipasi masyarakat di dalamnya?
7. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata ?
8. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata ?

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA (Masyarakat Desa Gunungsari)

Nama :

Pekerjaan :

Pertanyaan

1. Bagaimana awal terbentuknya desa wisata di Kota Batu?
2. Bagaimana pengelolaan desa wisata di Kota Batu?
3. Bagaimana pengembangan desa ekowisata yang dilakukan oleh masyarakat?
4. Program-program apa saja yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan desa ekowisata?
5. Bantuan apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah di desa ekowisata?
6. Bagaimana keterkaitan masyarakat dalam upaya pengembangan desa ekowisata yang dilakukan oleh pemerintah?
7. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata?
8. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata?

DAFTAR LAMPIRAN WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Andi Susilo
Kepala Desa Gunungsari

Wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani
Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata



Wawancara dengan Bapak Mulyo Adji
Kepala Seksi Bimbingan dan Pelatihan





Wawancara dengan Bapak Suroso Kepala
Seksi Pengembangan SDM



Wawancara dengan Ibu Astuti warga desa
Gunungsari pengelola wisata petik mawar



Wawancara dengan Bapak Aziz Ketua
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)



Wawancara dengan Bu Siti masyarakat desa
Gunungsari sekaligus petani mawar



Proses Pemotongan mawar yang dilakukan setiap pagi hari

LAMPIRAN FOTO



Kantor Desa Gunungsari, Kecamatan bumiaji Kota batu





Pintu masuk menuju Kebun Mawar (Wisata Petik Mawar)



Fasilitas lahan parkir wisata petik mawar warga desa Gunungsari



Akses berupa jalan menuju wisata petik mawar desa Gunungsari



Lahan Kebun Mawar milik warga Gunungsari



Lahan Kebun Mawar milik warga Gunungsari